



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 27 /VI.01/HK/2022

TENTANG

MASTERPLAN PROGRAM SMART SCHOOL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Misi Ketiga Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Penyandang Disabilitas”, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan Program *Smart School* sebagai salah satu agenda kerja prioritas daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa pelaksanaan Program *Smart School* di Provinsi Lampung memerlukan komitmen bersama antara pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang diwujudkan dalam Dokumen *Masterplan* Pendidikan Program *Smart School* Provinsi Lampung Tahun 2021-2024;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Masterplan Pendidikan Program *Smart School* Provinsi Lampung Tahun 2021-2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2020 Satu Data Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG MASTERPLAN PROGRAM SMART SCHOOL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021-2024.**
- KESATU : Menetapkan *Masterplan* Program *Smart School* Provinsi Lampung Tahun 2021-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dokumen *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka pencapaian Program *Smart School* yang merupakan komitmen bersama antara pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dengan tujuan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui penerapan Program *Smart School* pada jenjang pendidikan menengah atas, dengan meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
- penerapan *Smart School* di 15 (lima belas) kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
 - peningkatan kualitas sekolah sebagai sebuah entitas pendidikan berbasis teknologi informasi yang dapat mengoptimalkan potensi setiap peserta didik;
 - pengurangan kesenjangan (*disparitas*) pendidikan di daerah melalui pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas di Provinsi Lampung; dan
 - mewujudkan ekosistem pendidikan yang meliputi unsur di dalam sekolah yang meliputi tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana serta unsur di luar sekolah yang meliputi pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha maupun elemen masyarakat lainnya.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-3-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu syarat untuk menjadi bangsa yang maju dan besar adalah melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara eksplisit mengamanatkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi salah satu tujuan bernegara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Definisi pendidikan tersebut secara lengkap menjelaskan bahwa pendidikan tidak semata-mata terkait dengan upaya individu semata, akan tetapi harus dilaksanakan sebagai suatu sistem yang terencana dan menyeluruh agar terwujud keluaran optimal dari suatu proses pendidikan. Tidak hanya itu, keluaran tersebut diharapkan berdampak pada perbaikan dan kemajuan bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

Lebih lanjut, batang tubuh UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Komponen pendidikan harus diidentifikasi secara spesifik agar setiap aspek yang mendukung pelaksanaan suatu sistem pendidikan dapat ditempatkan sesuai proporsinya. Sekalipun tugas utama penyelenggaraan sistem pendidikan merupakan tugas pemerintah, akan tetapi semua pihak dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Terlebih pada era disrupsi seperti saat ini, sistem pendidikan harus mampu mengantisipasi sekaligus mengimbangi tantangan dan dinamika kehidupan yang berubah sangat cepat. Diperlukan paradigma berpikir yang luwes sekaligus visioner agar kualitas pendidikan dapat senantiasa meningkat dari waktu ke waktu.

Pada tataran Provinsi Lampung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selain itu, dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 memuat juga 33 Agenda Kerja Utama yang merupakan program-program unggulan selama periode jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019-2024. Salah satu dari Agenda Kerja Utama di bidang pendidikan adalah *Smart School*. Program *Smart School* bertujuan untuk mewujudkan sekolah cerdas yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur pendidikan seperti siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana serta lingkungan pendidikan. Agar lebih optimal dalam pencapaian tujuannya, integrasi tersebut dapat diperkuat melalui sebuah sistem teknologi-informasi.

Program *Smart School* mendukung pencapaian Misi Ketiga yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu *meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas*. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai intervensi sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Pada urusan pendidikan, kewenangan Pemerintah Provinsi adalah pada jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA dan SMK). Namun sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki peran dan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar seluruh urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Untuk itu, disusunlah dokumen Masterplan Pendidikan *Smart School* di Provinsi Lampung Tahun 2021. Dokumen ini diperlukan agar *Smart School* sebagai suatu konsep pendidikan dapat diterapkan dan dikembangkan di Provinsi Lampung. Dalam jangka pendek, Program *Smart School* merupakan salah satu dari Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Namun dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung. Sehingga cita-cita dan amanat bernegara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dicapai di Provinsi Lampung.

1.2 DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

Dokumen Masterplan Pendidikan *Smart School* di Provinsi Lampung Tahun 2021 ini bertujuan untuk :

1. Menjabarkan Konsep *Smart School* ke dalam tataran pelaksanaan pada jenjang pendidikan menengah di Provinsi Lampung;
2. Mengembangkan penerapan *Smart School* di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;
3. Meningkatkan kualitas sekolah sebagai sebuah entitas pendidikan berbasis teknologi-informasi yang dapat mengoptimalkan potensi setiap peserta didik;

4. Mengurangi disparitas (kesenjangan) pendidikan di daerah melalui pemerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas di Provinsi Lampung;
5. Mewujudkan ekosistem pendidikan yang meliputi unsur di dalam sekolah antara lain guru, murid, kurikulum, sarana dan prasarana serta unsur di luar sekolah yang meliputi pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha maupun elemen masyarakat lainnya;

Manfaat dari penyusunan dokumen Masterplan Pendidikan *Smart School* di Provinsi Lampung Tahun 2021 ini adalah untuk mengakselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan melalui penerapan *Smart School* pada jenjang pendidikan menengah atas di Provinsi Lampung.

1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN

Sistematika Dokumen Masterplan Pendidikan *Smart School* Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Sistematika Dokumen

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1 Tinjauan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
- 2.2 Gambaran Umum Kependidikan di Provinsi Lampung

BAB III TINJAUAN REFERENSI

- 3.1 Konsep *Smart School*
- 3.2 Penerapan *Smart School*

BAB IV KERANGKA PELAKSANAAN SMART SCHOOL DI PROVINSI LAMPUNG

- 4.1 Pilar *Smart School*
- 4.2 Dukungan Kelembagaan
- 4.3 Dukungan Pendanaan
- 4.4 Indikator Pelaksanaan

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

- 5.1 Monitoring
- 5.2 Evaluasi

BAB VI PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG

2.1 TINJAUAN RPJMD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis, dan praktis melalui rangkaian proses dan tahapan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis itu kemudian di tuangkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 memuat penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah yang akan dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2019-2024. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017), Dokumen RPJMD ini telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selain memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan, dokumen RPJMD ini juga memuat janji politik yang tertuang menjadi 33 Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode Tahun 2019-2024. Salah satu dari 33 Agenda Kerja Utama tersebut adalah *Smart School*.

2.1.1 VISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stake holders dan terkristalisasi sebagai jati diri. Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh stake holders untuk berperan

serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stake holders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi menentukan arah pembangunan daerah atau kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dituangkan dalam RPJMD merupakan visi pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu proses Pilihan Kepala Daerah. Sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut, telah ditetapkan Visi Pembangunan Provinsi Lampung periode 2019-2024 adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”

Memperhatikan visi pembangunan tersebut, diharapkan masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi **Rakyat Lampung Berjaya** tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1. Kehidupan masyarakat yang aman : agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
2. Kehidupan masyarakat yang berbudaya : kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah

terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

3. Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing : dalam kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
4. Kehidupan yang sejahtera : adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Visi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 tersebut dibentuk dalam upaya untuk mendukung pencapaian Visi Nasional 2005 - 2025 “ Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur ” dan Visi Provinsi Lampung 2005 – 2025 yaitu

“LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025”

Maju mempunyai konotasi modern atau *industrialized*. Kemajuan mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum).

2.1.2 MISI

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi arah untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Lampung Periode 2019-2024 tersebut ditetapkan Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2: Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Secara lebih rinci, ke-enam Misi Pembangunan di atas dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

Misi 1

Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-1, Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai yang didukung dengan kepastian hukum:

- a. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
- b. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
- c. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
- d. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan;
- e. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya;
- f. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- h. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah;

Misi 2

Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik

Komitmen dalam melaksanakan Misi-2, Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik:

- a. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;

- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
- d. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
- e. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
- f. Mendorong peran BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah serta membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di sektor Pertanian, Pariwisata dan ekaonomi Kreatif, Infrastruktur, Energi, dan Transportasi;
- g. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan;
- h. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

Misi 3

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas

Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas:

- a. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA), kejuruan (SMK), dan SLB bekerjasama dengan lembaga terkait;

- b. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
- c. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
- d. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;
- e. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
- f. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
- g. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas;
- h. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan penyandang disabilitas.

Misi 4

Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah

Komitmen dalam melaksanakan Misi-4, Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi, konektivitas wilayah, dan sistem permukiman:

- a. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
- b. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal

- dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
- c. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
 - d. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
 - e. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
 - f. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
 - g. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan;
 - h. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Misi 5

Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan

Komitmen dalam melaksanakan Misi-5, Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan:

- a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
- b. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, permodalan fasilitasi dan jaminan melalui BUMD Jamkrida, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
- c. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;

- d. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
- e. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
- f. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan dengan BUMD Jamkrida, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
- g. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Pekerja.

Misi 6

Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama:

- a. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- b. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
- c. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- d. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;

- e. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- f. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- g. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
- h. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (illegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peranserta masyarakat;
- i. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Lampung yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik. Yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung.

Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 terdiri dari 8 (delapan) tujuan, 13 (tiga belas) indikator tujuan, 18 (delapan belas) sasaran dan 18 (delapan belas) indikator sasaran. Penentuan proyeksi indikator tujuan dan indikator sasaran ini telah melibatkan pemangku kepentingan terkait serta para pakar dan akademisi. Perhitungan proyeksi tersebut mempertimbangkan teori serta data masa lalu capaian pembangunan Provinsi Lampung berdasarkan publikasi BPS. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung serta target indikator tujuan dan indikator sasaran Tahun 2019-2024 tergambar pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 1 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		2020		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				TARGET SETELAH PERUBAHAN				KONDISI AKHIR		
						2018	2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
VISI: Rakyat Lampung Berjaya																				
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai																				
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya aman dan damai	1.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68	73,1	69	73,1	70	71	72	73	73,3	73,5	73,7	74	74
		1.2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76	1.2.1	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	68,67	68,67	72	72,56	73	74	75	76	73	74	75	76	76
		1.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,3	1.3.1	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	-	-	-	54,3	-	-	-	-	54,8	55,3	55,8	56,3	56,3
Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik																				
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	2.1.1	Meningkatnyan kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	CC	CC (60,05)	B	CC(52,03)	B	BB	BB	A	B	B	B	BB	BB
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas																				
3	Meningkatkan sumber daya manusia	3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,6-70,9	3.1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan, pendidikan serta daya beli	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,02	69,57	-	69,69	-	-	-	72,72	69,69-70	70-70,3	70,3-70,6	70,6-70,9	70,6-70,9
		3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8-4	3.2.1	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,05	4,03	3,85	4,67	3,26	3,66	3,57	3,48	4-4,5	4,3-4,4	4,0-4,3	3,8-4	3,8-4
4	Meningkatkan perlindungan anak dan disabilitas	4.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,47	4.1.1	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			-	63,47	-	-	-	-	65,47	67,47	69,47	71,47	71,47

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		2020		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				TARGET SETELAH PERUBAHAN				KONDISI AKHIR
						2018	2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
5	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	5.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91	5.1.1 Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,82	69,23	64,24	69,06	64,45	64,66	64,87	65,08	69,43	69,66	70	70,22	70,22
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah																		
6	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur	6.1 Capaian rata-rata indikator (Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi, Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah (%) dan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga)	84,66	6.1.1 Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	-	6,01	-	70,69	-	-	-	-	74	76	77	78	78
				6.1.2 Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah (%)		88,8	-	90,21	-	-	-	-	91,20	92,31	93,01	94,19	94,19
				6.1.3 Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	92,13	95,76	94	96,5	95	96	97	98	95	96	97	98	98
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan																		
7	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian dan hilirisasi	7.1 Pertumbuhan Ekonomi	4,5-5,5	7.1.1 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,25	5,27	-	-1,67	-	-	-	-	2,5-3,5	3-4	3,5-4,5	4,5-5,5	4,5-5,5
				7.1.2 Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	105,83	103,2	106,98	94,73	107,48	107,98	108,48	108,98	101-102	102-103	104-105	105-106	105-106
				7.1.3 Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi	2,73	3,44	3,0 - 3,5	2	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
				7.1.4 Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,01	12,3	11,1	12,76	10,62	10,14	9,66	9,18	12,76-12,4	12,4-11,9	11,9-11,4	11,4-10,9	11,4-10,9
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama																		
8	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	8.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,51	8.1.1 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,62	59,28	59,63	66,95	61,15	61,92	62,57	63,32	68,23	68,66	69,09	69,51	69,51

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		2020		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				TARGET SETELAH PERUBAHAN				KONDISI AKHIR
						2018	2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		8.2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,29%	8.2.1 Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	51,50%	4,46%	-	6,86%	-	-	-	-	6,74%	6,915%	7,066%	7,29%	7,29%
		8.3 Indeks Resiko Bencana	137,2	8.3.1 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	145,1	146,78	144,7	146,78	144,3	143,9	143,5	143,1	142,9	141	139,1	137,2	137,2

2.1.4 AGENDA KERJA UTAMA

Pencapaian Visi dan Misi dengan dibarengi komitmen yang dilakukan melalui 33 Agenda Kerja Utama dan dituangkan dalam program dan kegiatan prioritas. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas tersebut, sepanjang tahun 2020 dan 2021 dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19, yang berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan seluruh prioritas pembangunan daerah, yang dipicu oleh penurunan kualitas kesehatan masyarakat yang bersifat global serta implikasinya terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif serta sektor-sektor penopang di dalamnya.

Dalam rangka upaya pemantapan pemulihan ekonomi, salah satunya adalah melalui peningkatan investasi. Realisasi investasi di Provinsi Lampung tahun 2020 cukup baik. Realisasi investasi sebesar Rp 14,2 Trilyun. Jauh lebih baik dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp 4,7 Trilyun. Namun demikian perlu terus diupayakan peningkatan investasi dalam rangka percepatan pemantapan pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 di Lampung. Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi, pemberian insentif pajak bagi investor, jaminan kepastian hukum berusaha, kepastian biaya pelayanan, promosi investasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mendukung usaha, bisnis dan investasi. Beberapa rencana program strategis Provinsi Lampung yang sedang dilakukan untuk mendorong peningkatan investasi antara lain: Pembangunan Kawasan pariwisata Terpadu Bakauheni, Pembangunan Kawasan Industri Tanggamus, Kawasan Industri Way Pisang, Implementasi Kartu Petani Berjaya, Pengembangan *Food Estate* dan Rencana Pengembangan *Sport Center*.

Dalam rangka peningkatan jumlah pengangguran akibat dampak Covid-19 serta sebagai tindak lanjut peningkatan investasi, maka Provinsi Lampung akan membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja. Sedangkan dalam rangka meringankan masyarakat yang terkena dampak langsung, misalnya para pedagang, para pekerja yang terdampak dan yang tidak dapat menjalankan aktivitas ekonomi maka Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan program bantuan sosial.

Untuk pemulihan kesehatan masyarakat maka konsentrasi sektor kesehatan sebagai dampak penanganan Covid-19, yaitu melalui penguatan sistem Kesehatan, antara lain penguatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah khususnya pada operasional pelayanan PCR / *Swab test*; penguatan sistem rujukan Rumah Sakit; support

mini oksigen untuk puskesmas rawat inap dan beberapa Rumah Sakit Pemerintah; penguatan *surveillance* dan screening serta peningkatan upaya promotive dan preventif melalui implementasi germas dan penguatan posbindu.

Selain penanganan kesehatan pasca pandemi *Covid-19*, Provinsi Lampung juga akan mengembangkan Kawasan Kesehatan Bandara Radin Intan II Lampung yaitu Rumah Sakit Internasional Aero City. Pengembangan ini dimaksudkan agar Provinsi Lampung memiliki rumah sakit dengan layanan sub spesialisik unggulan yang dapat mendukung wisata kesehatan (*health tourism*) di Provinsi Lampung.

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas, baik yang dilaksanakan dalam rangka penanganan dampak *Covid-19* maupun prioritas lainnya tergambar dalam Agenda Kerja Utama, yaitu:

Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai

Agenda Kerja :

1. Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
2. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Lampung.
4. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
5. Lampung Menuju Bebas Narkoba
 - a. Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama

- b. memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan
- c. Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi

Misi 2: Mewujudkan “Good Governance” untuk Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik

Agenda Kerja :

6. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan :
 - a. Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi
 - b. Menciptakan sistem penjenjangan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi
 - c. Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan
 - d. Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja
 - e. Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi
 - f. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - g. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota serta dunia usaha
7. APBD Rakyat Berjaya :
 - a. Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan publik
 - b. Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
8. Smart Village
 - a. Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa
 - b. memfasilitasi digitalisasi administrasi desa
 - c. e-participation : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan atau aplikasi
9. Pendampingan program pembangunan desa
 - a. Memberikan fasilitasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa

- b. Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM dan Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Dan Penyandang Disabilitas

Agenda Kerja :

- 10. Perempuan Berjaya :
 - a. Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga
 - b. Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya dan ekonomi
 - c. Memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan.
- 11. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan :
 - a. Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak
 - b. Merevitaliasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak
 - c. Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak
 - d. Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik
 - e. Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak
 - f. memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu
- 12. Anak Muda Berjaya :
 - a. Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara kalangan muda berbasis komunitas
 - b. Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda
 - c. Mencetak wirausahawan muda
 - d. Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota
- 13. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada :
 - a. Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga
 - b. Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi atlet berprestasi
 - c. Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten
- 14. Lampung Sehat :

- a. Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas
 - b. Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi bersinegi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit
 - d. Melaksanakan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting
 - e. Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan pasca Covid-19 sektor kesehatan
15. **Smart School.** Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan :
- a. Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis starup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA.
 - c. Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatan kapasitas lainnya
16. **Revitalisasi SMK.** Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan :
- a. Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha
 - b. Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri
 - c. Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah

Agenda Kerja :

17. Infrastruktur Lampung Berjaya

- a. Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota.
- b. Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya.
- c. Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- d. Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

18. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat :

- a. Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur.
- b. Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat
- c. Perbaikan dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong

19. Lampung Terang Berjaya. Memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus kepada :

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik
- b. mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas bumi
- c. kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian

Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang Dengan Wilayah Perkotaan

Agenda Kerja :

20. Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk mendapat :

- a. Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pestisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani

- b. Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani
 - c. Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani
 - d. Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi
21. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
 22. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu
 23. Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan
 24. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) serta mewujudkan Lampung sebagai Lumbung Ternak Nasional melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri
 25. Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :
 - a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendamping pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan
 - b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
 - c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia
 - d. SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan
 26. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar
 27. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan :
 - a. Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung
 - b. Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia
 - c. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata

- d. Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui)
- 28. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.
- 29. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui :
 - a. Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal
 - b. Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usaha dan pemasaran
 - c. Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
 - d. Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)
- 30. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan :
 - a. Menyederhanakan perizinan
 - b. Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha
 - c. Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan
 - d. Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi
- 31. Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedingrintaraan ke Lampung.

Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama

Agenda Kerja :

- 32. Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat :
 - a. Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan
 - b. mengorentasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat
 - c. Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan
- 33. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional

2.2 GAMBARAN UMUM KEPENDIDIKAN DI PROVINSI LAMPUNG

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Lampung pada RPJMD periode Tahun 2019-2024. Pada Tahun ajaran 2020-2021 jumlah peserta didik pada SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Provinsi Lampung berjumlah 4.228.318 siswa. Data tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Data Peserta Didik Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2020-2021

No	Wilayah	Total	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	Kab. Lampung Tengah	420	127,644	47,72	19,337	18,365	207
2	Kota Bandar Lampung	806,257	92,492	46,102	25,578	24,085	618
3	Kab. Lampung Selatan	318,038	97,464	34,677	16,065	19,832	150
4	Kab. Lampung Timur	296,909	92,068	37,07	14,987	17,784	135
5	Kab. Lampung Utara	229,993	60,709	24,104	14,311	8,869	122
6	Kab. Tanggamus	183,213	58,219	18,726	8,704	7,564	90
7	Kab. Way Kanan	128,999	49,33	17,306	9,013	6,35	47
8	Kab. Tulang Bawang	105,529	45,815	16,71	6,164	5,84	31
9	Kab. Pringsewu	256,034	39,348	16,981	8,369	12,336	179
10	Kab. Pesawaran	69,932	42,837	15,433	6,304	5,358	0
11	Kab. Tulang Bawang Barat	137,661	30,258	11,575	4,737	4,091	87
12	Kab. Lampung Barat	48,98	28,665	10,483	6,094	3,738	0
13	Kota Metro	400,068	15,836	10,162	7,364	9,706	357
14	Kab. Mesuji	87,286	24,379	7,263	2,533	3,111	50
15	Kab. Pesisir Barat	739,353	17,949	6,308	3,9	711,196	0
	Total	4,228,318	823,013	320,62	153,46	858,225	2073

Sumber: Dapodik Provinsi Lampung 2021

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa peserta didik pada SMK lebih banyak dibandingkan pada SMA. Jumlah yang lebih banyak ini diharapkan dapat memberikan tambahan penduduk yang siap kerja dengan skill setara jenjang pendidikan menengah atas. Siswa SMK mempunyai peluang bekerja lebih besar dibandingkan lulusan SMA karena di SMK para siswa akan diberikan keahlian sesuai potensi yang dia miliki.

Selain data di atas, terdapat juga data jumlah sekolah, guru dan murid SMA di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada kondisi tahun 2017-2020. Data ini

menjadi salah satu data dasar dalam merumuskan pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Lampung.

Tabel 2. 3 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun 2017-2020

Kabupaten/Kota	2017			2018			2019			2020		
	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
Lampung Barat	16	612	5.517	18	445	5.982	18	447	6.013	18	465	6.095
Tanggamus	27	921	7.907	25	623	8.624	25	617	8.593	25	636	8.715
Lampung Selatan	55	1.486	13.696	56	979	15.206	55	984	15.485	56	1.014	16.093
Lampung Timur	43	1.551	13.983	49	1.054	14.966	50	1.073	14.869	52	1.093	14.982
Lampung Tengah	63	208	16.658	67	1.393	18.676	70	1.440	18.947	72	1.435	19.347
Lampung Utara	40	1.424	13.025	54	989	14.414	55	997	14.135	54	1.012	14.324
Way Kanan	37	858	7.939	41	644	8.512	40	636	8.631	40	671	9.037
Tulang Bawang	23	605	4.893	24	435	5.910	24	434	6.001	24	436	6.177
Pesawaran	19	593	5.325	20	458	5.982	20	458	5.935	21	476	6.308
Pringsewu	22	852	7.933	22	649	8.640	21	620	8.438	21	598	8.369
Mesuji	12	251	2.824	14	201	2.885	14	203	2.590	15	201	2.538
Tulang Bawang Barat	14	516	3.999	18	361	5.759	17	366	4.701	17	365	4.737
Pesisir Barat	12	358	364	12	265	3.726	12	283	3.835	12	289	3.098
Bandar Lampung	62	2.587	26.486	66	1.786	25.088	69	1.773	25.237	68	1.769	25.612
Metro	17	754	6.773	17	523	7.298	17	522	7.262	18	525	7.364
Provinsi Lampung	462	13576	137.322	503	10.805	151.668	507	10.853	150.672	513	10.985	152.796

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 2021, diolah.

Perbandingan antara jumlah guru dan jumlah siswa untuk jenjang SMA maupun SMK hingga tahun 2019 sebesar 1:14, artinya rasio antara guru dan siswa telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Meskipun demikian kondisi ini masih perlu mendapat perhatian mengingat jumlah guru yang dihitung adalah seluruh guru dengan status PNS dan Non PNS, sedangkan mayoritas guru yang ada di Provinsi Lampung masih didominasi oleh guru non PNS dengan demikian kondisi ini belum menggambarkan kondisi riil.

Namun indikator keberhasilan atau kemajuan program-program pembangunan di bidang pendidikan tidak semata dapat dilihat dari jumlah sekolah, guru dan siswa saja. Ada beberapa indikator lainnya seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah, (APTS), Angka Melek Huruf (AMH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan lain-lain. Indikator-indikator tersebut dikembangkan oleh pemerintah terutama untuk melihat seberapa besar partisipasi penduduk untuk bersekolah dan belum melihat hasil berupa kualitas pendidikannya.

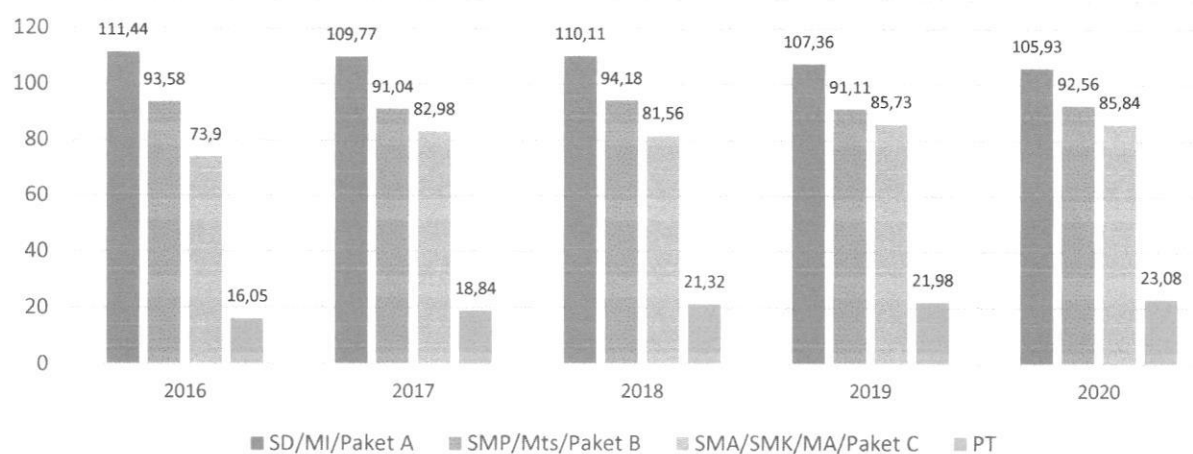
2.2.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR

Tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan dapat terlihat dari indikator Angka Partisipasi Kasar (APK). APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Dengan kata lain, perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Adapun rumus perhitungan APK adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{APK SD} &= \frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\% \\
 \text{APK SMP} &= \frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\% \\
 \text{APK SM} &= \frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\% \\
 \text{APK PT} &= \frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Contoh: APK SMA/SMK/MA/Paket C Kota Metro Tahun 2018 sebesar 61,32 persen, artinya persentase penduduk berusia 16-18 tahun di Kota Metro yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA/Paket C sekitar 61,32 persen.

**Grafik 2. 1Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Lampung Tahun 2016-2020**

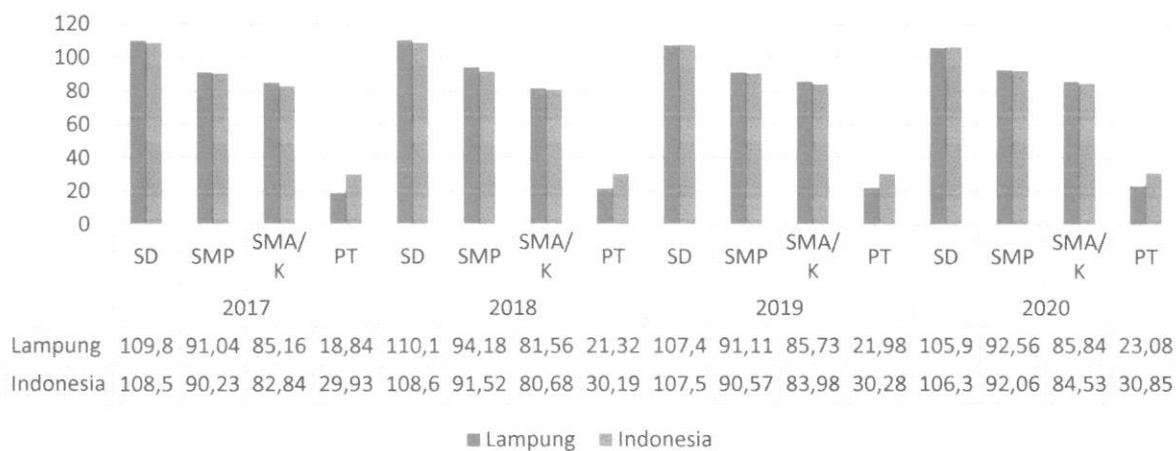


Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

APK jenjang sekolah terbanyak dari tahun 2016-2020 adalah pada jenjang SD/MI/Paket A, lalu diikuti pada jenjang SMP/MTs/Paket B, kemudian menurun pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dan paling rendah pada jenjang perguruan tinggi. Bila dicermati, pada periode tahun 2016-2020 terjadi tren peningkatan APK pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dan jenjang perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan APK menunjukkan hasil yang semakin baik dari tahun ke tahun. Upaya untuk meningkatkan APK tersebut perlu terus dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat memperluas akses pendidikan SMA/SMK khususnya masyarakat Lampung yang telah menamatkan jenjang pendidikan SMP.

Bila dilakukan perbandingan APK Provinsi Lampung dengan APK nasional pada periode tahun 2017-2020, maka dapat disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 2. 2 Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Lampung – Nasional Tahun 2017-2020



Sumber : BPS RI 2021, diolah

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk periode tahun 2017-2020 nilai APK Provinsi Lampung pada jenjang SD, SMP dan SMA lebih tinggi daripada nasional. Namun, pada periode tersebut terlihat bahwa nilai APK pada jenjang perguruan tinggi di Provinsi Lampung selalu lebih rendah daripada nasional. Bahkan pada tahun 2017 selisihnya cukup besar yaitu sekitar 11 persen. Kendatipun demikian, selisih ini semakin mengecil di tahun 2020 yang mencapai sekitar 7 persen. Data ini menunjukkan bahwa setelah menamatkan pendidikan sampai jenjang SMA/SMK/MA/Paket C, sebagian besar penduduk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Provinsi Lampung. Ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebabnya diantaranya adalah faktor ekonomi dimana orang tua tidak memiliki dana untuk anaknya dapat kuliah di perguruan tinggi. Ada juga yang memiliki kecukupan dana dan tetap melanjutkan ke perguruan tinggi namun di luar Provinsi Lampung.

2.2.2 ANGKA PARTISIPASI MURNI

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM). Dari data APM dapat terlihat proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. APM berguna untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Adapun rumus perhitungan APM adalah :

APM SD =

$$\frac{\text{Jumlah murid SD/ sederajat usia 7 – 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$$

APM SMP =

$$\frac{\text{Jumlah murid SMP/ sederajat usia 13 – 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$$

APM SM =

$$\frac{\text{Jumlah murid SM/ sederajat usia 16 – 18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$$

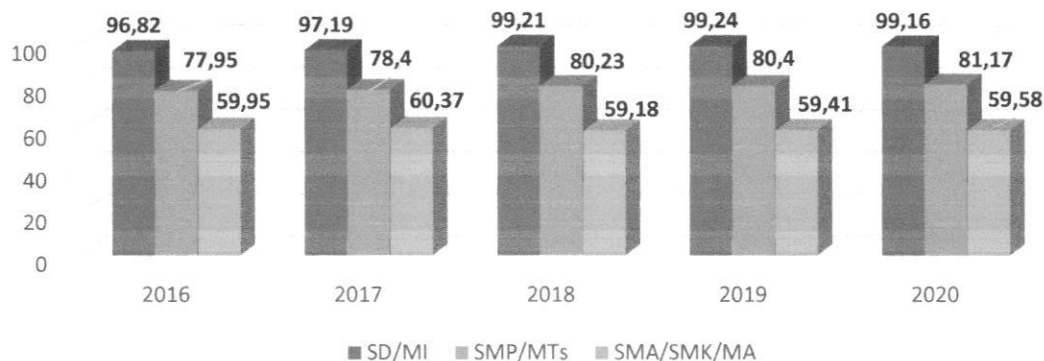
APM PT =

$$\frac{\text{Jumlah murid PT/ sederajat usia 19 – 24 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun}} \times 100\%$$

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan Contoh: APM SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Way Kanan tahun 2018 sebesar 64,71 persen, artinya sekitar 65 persen penduduk di Kabupaten Way Kanan yang berusia 13-15 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SMP/MTs/Paket B.

Data capaian APM Provinsi Lampung menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 3 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

Setiap tahunnya, Angka Partisipasi Murni (APM) paling tinggi ada di Jenjang Pendidikan SD/MI, kemudian berturut-turut jenjang SMP/MTs lalu jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2020, APM pada jenjang SD/MI adalah 99,16, sementara yang terendah adalah SMA/SMK/MA dengan nilai sebesar 59,58. Dari data tersebut terlihat bahwa pencapaian APM di jenjang pendidikan SD di Provinsi Lampung sangat tinggi. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan APM jenjang SD Provinsi Lampung bila dibandingkan APM jenjang SD Tahun 2019. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan orang tua tidak mendaftarkan anaknya bersekolah pada tahun 2020.

Bila data APM ini dibandingkan dengan data APK, maka terjadi pengurangan nilai dimana APM lebih rendah daripada APK. Hal ini dapat dipahami karena secara definisi, APK tidak memperhitungkan kesesuaian umur siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Sehingga jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Bila dilakukan perbandingan APM Provinsi Lampung dengan APM nasional pada periode tahun 2017-2020, maka dapat disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 2. 4 Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Lampung – Nasional Tahun 2017-2020



Sumber : BPS RI 2021, diolah

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwa untuk periode tahun 2016-2020 nilai APM Provinsi Lampung pada jenjang SD dan SMP relatif sama atau mendekati nilai nasional. Akan tetapi pada jenjang SMA/SMK terdapat selisih yang cukup besar terutama pada tahun 2016 dan 2017. Namun selisih ini berkurang sejak tahun 2018 sampai dengan 2020. Capaian ini menjadi salah satu bukti yang menunjukkan adanya perbaikan efektivitas program partisipasi sekolah pada penduduk usia sekolah di Provinsi Lampung.

2.2.3 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH

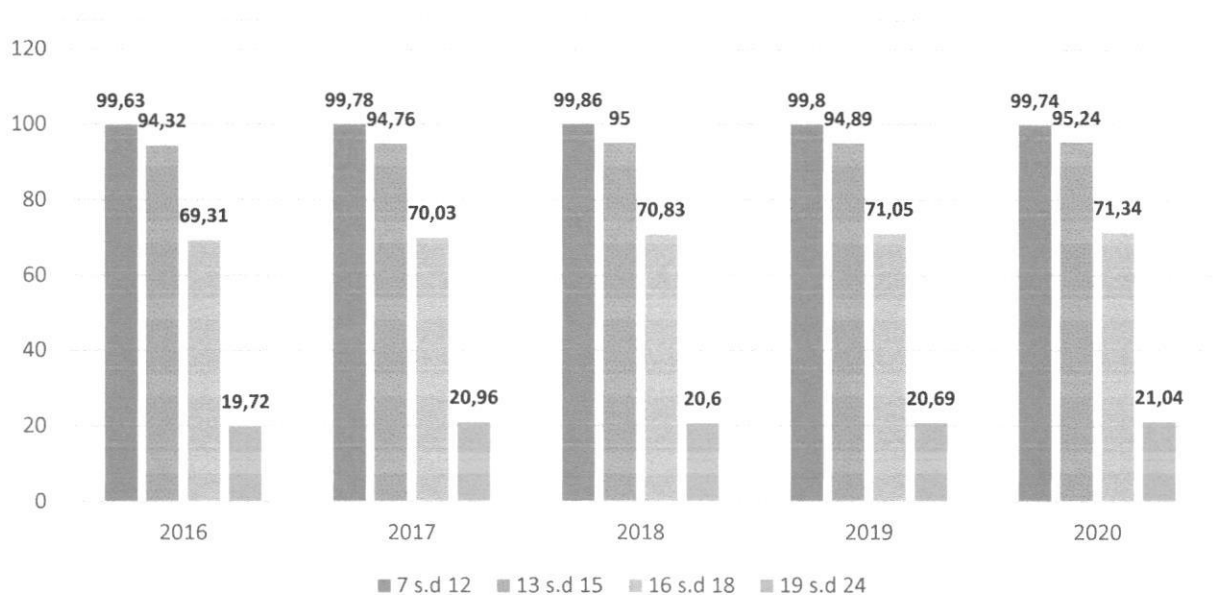
Ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Selain itu, indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan, namun hal tersebut tidak berarti meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Sebagai contoh APS 7-12 tahun Kabupaten Mesuji Tahun 2013

sebesar 95,44 persen, artinya sekitar 95 persen penduduk berusia 7-12 tahun di Kabupaten Mesuji sedang bersekolah. Dan pada jenjang tersebut dapat diketahui merupakan jenjang pendidikan sekolah dasar.

Capaian APS Provinsi Lampung menurut kelompok usia dapat terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 5 Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Usia Provinsi Lampung Tahun 2016-2020

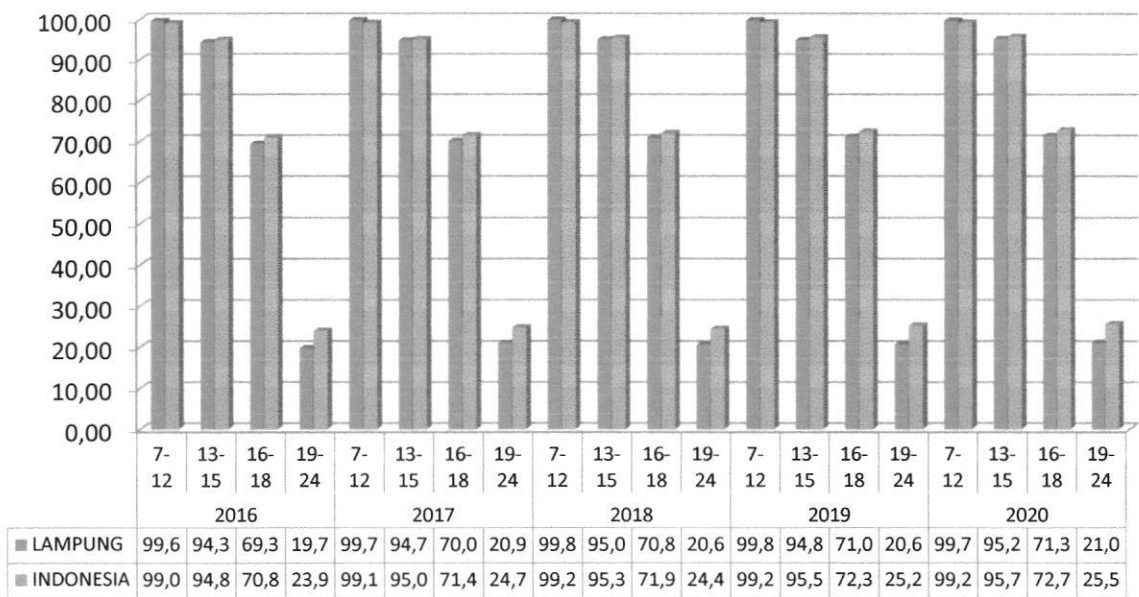


Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa APS pada kelompok usia 7 s.d 12 tahun hampir mencapai 100% dan ini merupakan nilai tertinggi. Lalu berikutnya, nilai APS pada kelompok usia 13 s.d. 15 tahun atau jenjang SMP/MTs dan selanjutnya pada kelompok usia 16 s.d. 18 tahun atau jenjang SMA/SMK/MA. Yang rendah adalah nilai APS pada kelompok usia 19 s.d. 24 tahun atau pada jenjang perguruan tinggi. Nilai APS ini relatif sejalan dengan nilai APK yang menunjukkan bahwa pada jenjang perguruan tinggi, partisipasi pendidikan cukup rendah. Sehingga dapat dipahami bahwa sebagian besar siswa yang tamat SMA tidak melanjutkan kuliah di perguruan tinggi.

Bila dilakukan perbandingan APS Provinsi Lampung dengan APS nasional pada periode tahun 2017-2020, maka dapat disajikan pada grafik berikut ini :

Grafik 2. 6 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenjang Pendidikan
Provinsi Lampung – Nasional Tahun 2017-2020



Sumber: BPS RI 2021, diolah

Jika ditinjau dari perbandingan antara Provinsi Lampung dengan nasional, Angka Partisipasi Sekolah untuk umur 7-12, 13-15 dan 16-18 tahun baik di Provinsi Lampung dan nasional, secara umum menunjukkan kondisi yang relatif sama yaitu mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Ini mengindikasikan bahwa semakin kecil persentase masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

2.2.4 ANGKA PUTUS SEKOLAH

Dalam upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun, putus sekolah masih merupakan persoalan tersendiri yang perlu penanganan serius dalam mencapai pendidikan untuk semua. Putus sekolah didefinisikan sebagai seseorang yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau berhenti bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan sehingga belum memiliki ijazah pada jenjang pendidikan tersebut. Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Angka putus sekolah dihitung untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok usia. Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

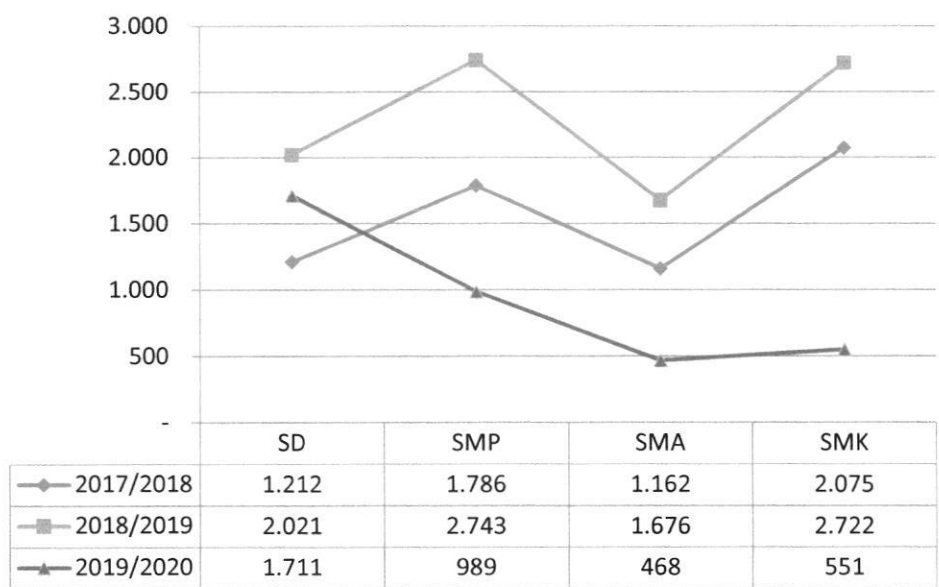
Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik. Sebagai contoh APTS 7-12 = 10,11% berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 10 sampai 11 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 10 anak yang putus sekolah.

Kondisi putus sekolah ini menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan. Terlebih lagi pada masa ini dimana tersedianya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik yang dikucurkan oleh pemerintah pusat maupun bersumber dari pemerintah daerah. Sehingga diharapkan tidak terjadi lagi kasus dimana ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah dikarenakan alasan biaya.

Adapun rumus perhitungan APTS ini adalah :

$$\begin{aligned} \text{APTS 7 – 12 tahun} &= \frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\% \\ \text{APTS 13 – 15 tahun} &= \frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\% \\ \text{APTS 16 – 18 tahun} &= \frac{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\% \\ \text{APTS 19 – 24 tahun} &= \frac{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun yang tidak bersekolah lagi}}{\text{Jumlah penduduk usia 19 – 24 tahun yang pernah/sedang bersekolah}} \times 100\% \end{aligned}$$

**Grafik 2. 7 Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) SD/SMP/SMA/SMK
Provinsi Lampung Tahun 2017-2020**



Sumber: Kemendikbud RI 2021, diolah

Jumlah anak putus sekolah pada semua jenjang, yaitu jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang sangat tinggi, akan tetapi jumlah tersebut turun lagi pada tahun 2020. Jumlah anak putus sekolah terendah pada jenjang SMA dan SMK, hal ini disebabkan karena jumlah anak yang bersekolah pada jenjang tersebut juga lebih sedikit dibandingkan pada jenjang SD dan SMP. Salah satu faktor terjadinya anak putus sekolah pada jenjang SMA dan SMK adalah dikarenakan faktor ekonomi keluarga dan jarak ke sekolah yang cukup jauh.

2.2.5 HARAPAN LAMA SEKOLAH

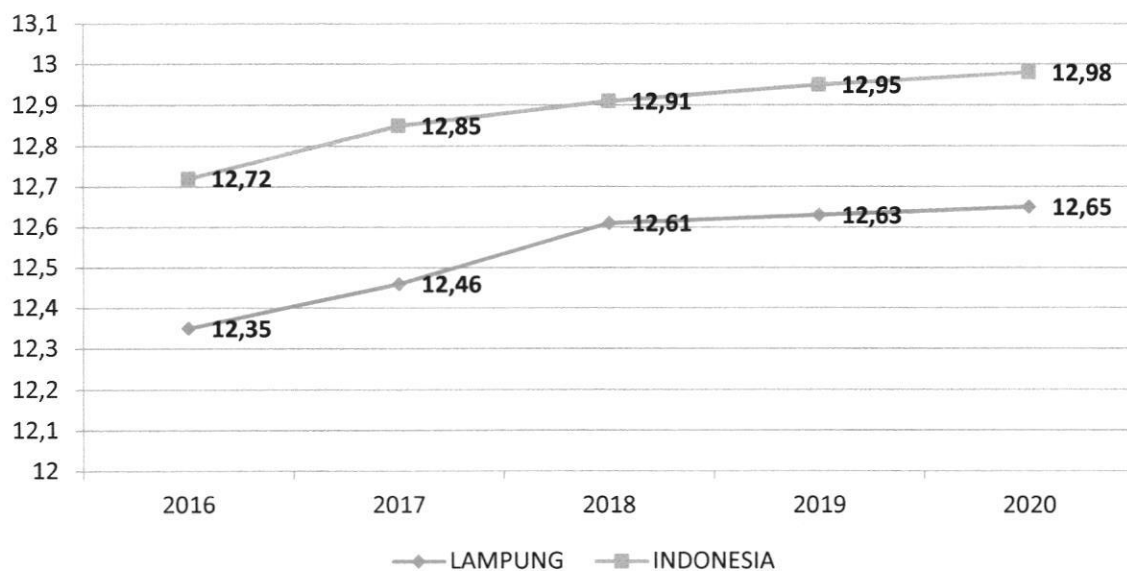
Secara definisi, harapan lama sekolah adalah lamanya (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Sebagai contoh, HLS Kabupaten Pringsewu pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Indikator HLS ini disepakati oleh United National for Development Programme atau Badan Dunia untuk Program Pembangunan menjadi salah satu indikator untuk menilai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indikator ini masih digunakan dikarenakan sebagian besar negara-negara berkembang masih mengalami rendahnya capaian expected years of schooling atau harapan lama sekolah.

Bila dibandingkan dengan negara-negara maju, indikator ini seolah menjadi tidak relevan, terlebih bagi negara maju yang menanggung semua biaya pendidikan dari pendidikan dasar, menengah sampai dengan pendidikan tinggi.

Berikut ini grafik harapan lama sekolah Provinsi Lampung dan nasional tahun 2016-2020 :

Grafik 2. 8 Harapan Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah setiap tahun terus naik dari sebelumnya walaupun masih berada di bawah angka nasional. Meskipun sangat lambat pertumbuhannya akan tetapi semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Lampung telah mencapai 12,65 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

2.2.6 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Secara definisi, Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Indikator ini dan indikator Harapan Lama Sekolah diformulasikan oleh *United Nations for Development*

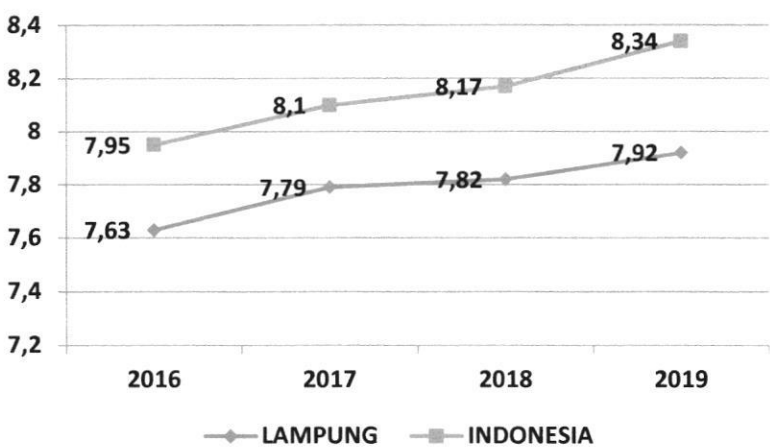
Programme (UNDP) pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Manfaat dari perhitungan rata-rata lama sekolah adalah :

- 1. Untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.
- 2. Untuk perencanaan dan evaluasi capaian program wajib belajar.

Berikut ini Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan nasional tahun 2016-2019 :

Grafik 2. 9 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2016-2019



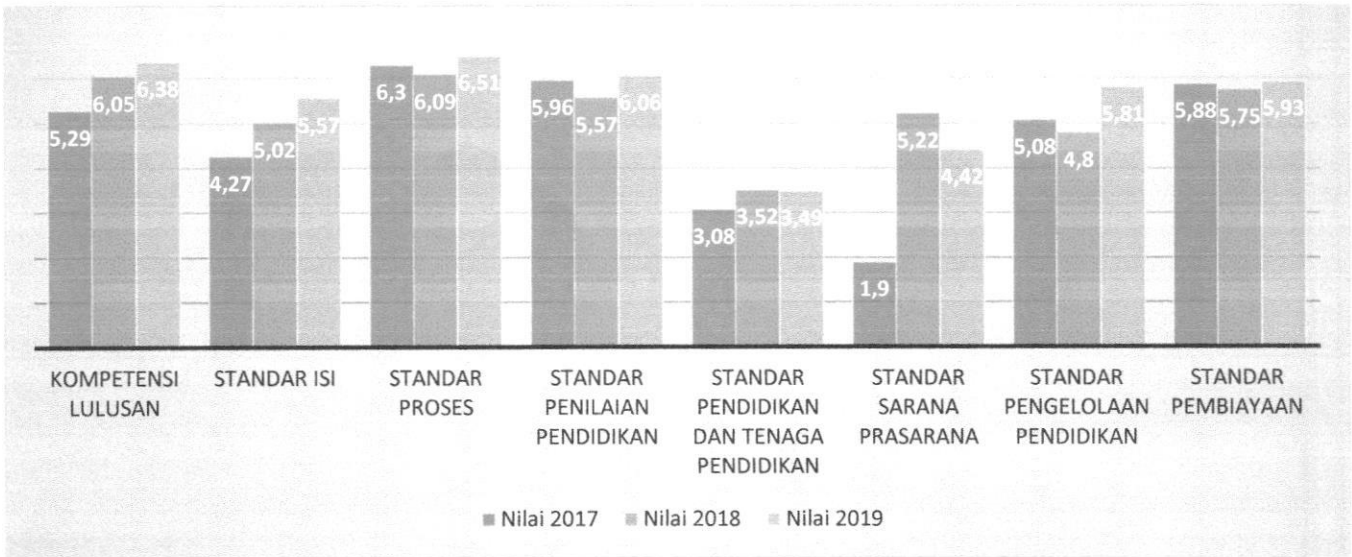
Sumber : BPS Provinsi Lampung 2021, diolah

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Rata-Rata Lama Sekolah di Lampung dan nasional menunjukkan tren pertumbuhan selama periode 2016 hingga 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Lampung yang lebih baik. Pada tahun 2019, secara rata-rata penduduk Provinsi Lampung usia 25 tahun ke atas mencapai 7,92 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas I). Capaian Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi Lampung masih berada di bawah capaian nasional yang telah mencapai 8,34.

2.2.7 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Standar nasional pendidikan merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Mutu di satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik dengan adanya pendekatan yang melibatkan semua komponen satuan pendidikan yang terstandar, sehingga terwujudnya pendidikan nasional yang berkualitas.

Grafik 2. 10 Capaian Standar Nasional Pendidikan Jenjang SMA
Provinsi Lampung Tahun 2017-2019



Sumber : LPMP Provinsi Lampung 2020, diolah

Sejak tahun 2018-2019, rata-rata indikator 7 standar nasional pendidikan jenjang SMA, selalu mengalami peningkatan kecuali indikator standar pendidikan dan tenaga pendidikan dan indikator standar sarana prasarana yang mengalami penurunan pada tahun 2019. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan memiliki nilai rendah di sub ketersediaan dan kompetensi guru, hal ini dikarenakan guru kurang memahami tentang kompetensi profesional serta kurangnya pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah. Indikator sarana prasarana memiliki nilai rendah karena kondisi ruang kelas yang belum terstandar. Hal ini dikarenakan luas lahan yang terbatas, jumlah siswa yang melebihi kapasitas, pemeliharaan yang tidak berkala serta pengadaan yang mengandalkan bantuan dari pemerintah.

Analisis mutu pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung memiliki nilai rendah pada indikator kompetensi kelulusan sub pengetahuan faktual, prosedural, konsepsional dan metakognitif, hal ini dikarenakan guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik. Standar isi untuk mutu sekolah yang belum melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan dikarenakan efektif pembelajaran tidak memenuhi alokasi waktu yang ditentukan serta muatan lokal yang belum menjadi mata pelajaran wajib disetiap sekolah. Standar proses pendidikan memiliki nilai rendah pada sub indikator proses pembelajaran yang dilaksanakan karena banyaknya sekolah yang mencari siswa sebanyak banyaknya dikarenakan jumlah BOS dan BOP tergantung jumlah siswa dan ruang kelas yang tersedia disekolah kuantitasnya kurang dari rasio yang ditentukan.

Indikator standar pengelolaan pendidikan memiliki nilai rendah pada kinerja kepala sekolah hal ini dikarenakan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah yang masih kurang. Sedangkan nilai standar pembiayaan masih kurang dari segi pelaporan pengelolaan dana, hal ini dikarenakan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun laporan pengelolaan pendanaan terbatas dan beban kerja ganda.

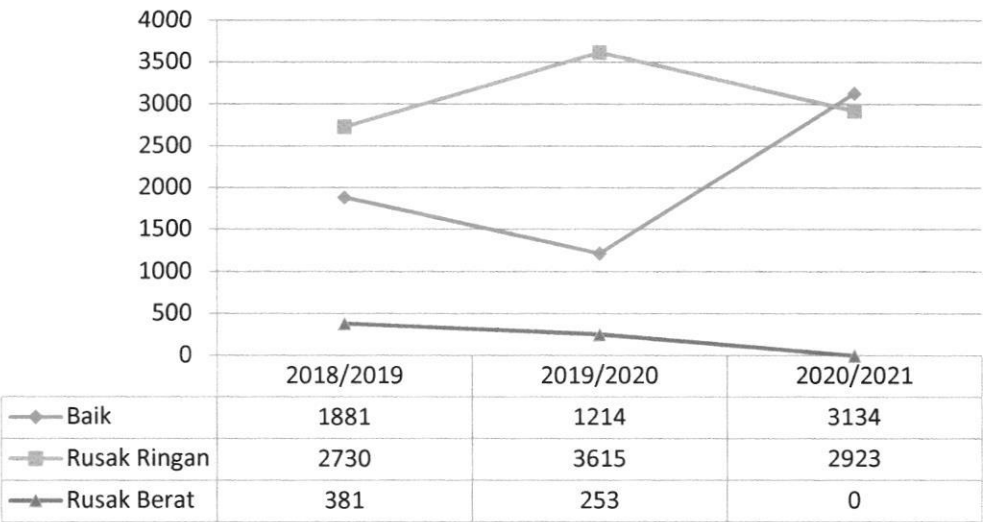
2.2.8 SARANA DAN PRASARANA

A. SMA

Pada tahun ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMA menurun, akan tetapi pada tahun ajaran 2020/2021 keadaan menjadi lebih baik, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik meningkat sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan menurun dan yang rusak berat mencapai angka 0 (nol). dapat dikategorikan dalam kondisi baik, meskipun tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.534 sekolah (tahun 2015) meningkat menjadi 2.780 sekolah di tahun 2017. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMA karena siswa SMA dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik. Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan, namun jumlahnya masih banyak, yaitu 2923 unit. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat.

Berikut ini grafik rasio sarana dan prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021 :

Grafik 2. 11 Rasio Sarana dan Prasarana SMA di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021

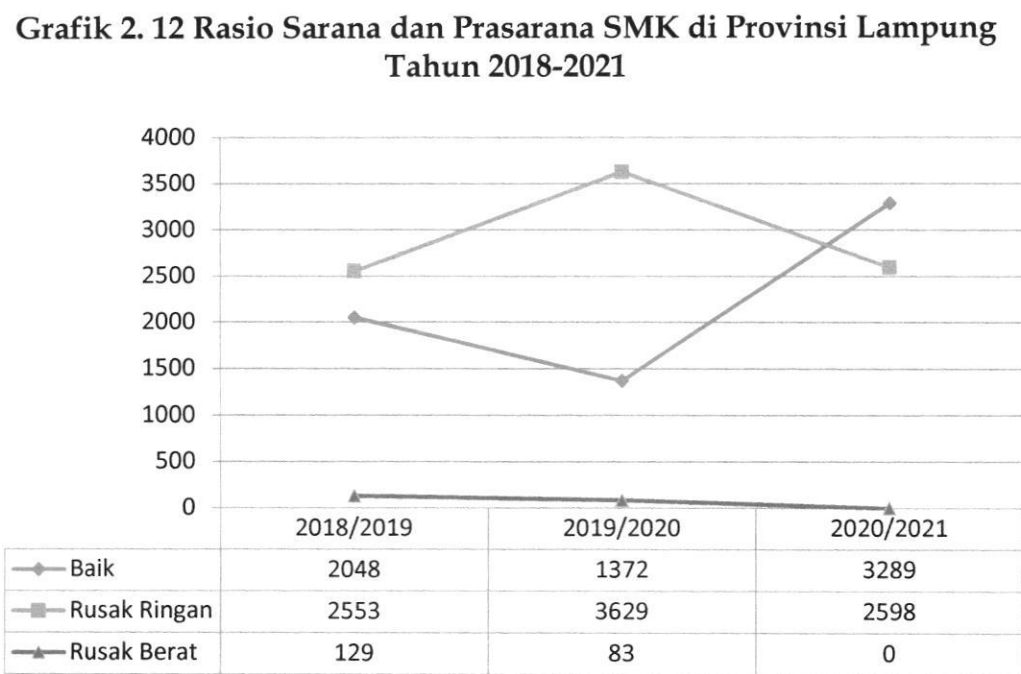


Sumber: Kemendikbud RI 2021, diolah

B. SMK

Kondisi sarana dan prasarana sekolah SMK mirip dengan kondisi SMA, dimana pada tahun ajaran 2019/2020, keadaan sarana dan prasarana di tingkat SMK menurun, akan tetapi pada tahun ajaran 2020/2021 keadaan menjadi lebih baik, terlihat dari jumlah sarana dan prasarana yang baik meningkat sedangkan sarana dan prasarana yang rusak ringan menurun dan yang rusak berat mencapai angka 0 (nol). dapat dikategorikan dalam kondisi baik, meskipun tingkat kerusakan ringan masih cukup tinggi yaitu dari 2.534 sekolah (tahun 2015) meningkat menjadi 2.780 sekolah di tahun 2017. Hal ini menjadi kabar baik bagi dunia pendidikan tingkat SMA karena siswa SMA dapat menikmati sarana prasarana yang lebih baik. Walaupun terjadi penurunan jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan, namun jumlahnya masih banyak, yaitu 2598 unit. Untuk itu masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut tidak menjadi lebih berat.

Berikut ini grafik rasio sarana dan prasarana SMK di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021 :



Sumber: Kemendikbud RI 2021, diolah

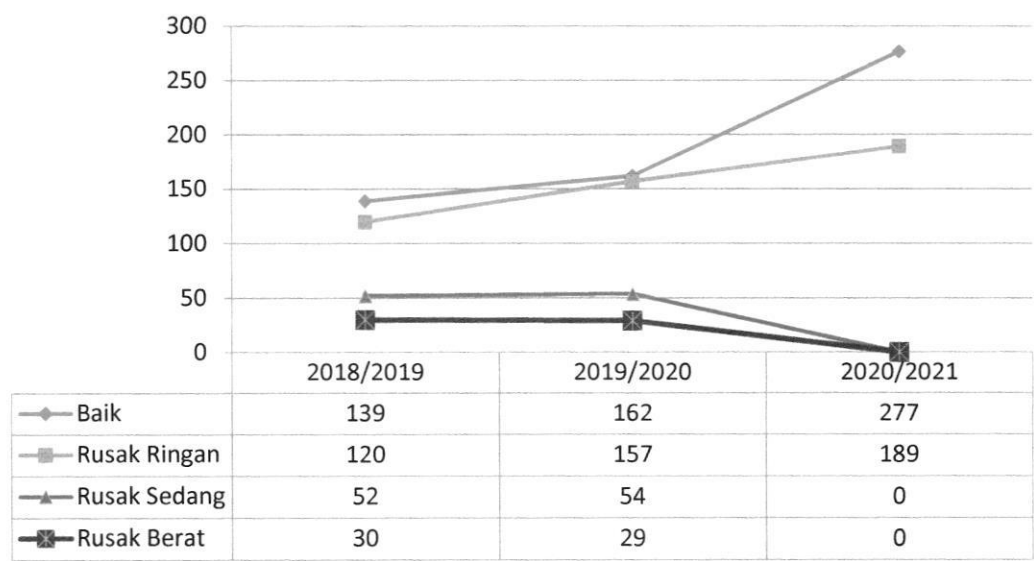
C. SEKOLAH LUAR BIASA

Sejak tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan tahun ajaran 2020/2021, jumlah sarana dan prasarana SLB baik, selalu bertambah, akan tetapi jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan juga meningkat. jumlah sarana dan prasarana yang rusak ringan ini perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar kerusakan ringan tersebut

tidak menjadi lebih berat. Akan tetapi jumlah sarana dan prasarana yang rusak sedang dan berat menurun bahkan mencapai angka 0 (nol), dengan demikian perlu upaya untuk memperbaiki jumlah sekolah yang rusak ringan agar kerusakannya tidak menjadi lebih berat.

Berikut ini grafik rasio sarana dan prasarana SLB di Provinsi Lampung Tahun 2018-2021 :

Grafik 2. 13 Rasio Sarana dan Prasarana SLB Provinsi Lampung Tahun 2018-2021



Sumber: Kemendikbud RI 2021, diolah

Tabel 2. 4 Jumlah Sekolah Luar Biasa di Provinsi Lampung Tahun 2016-2020

SLB	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Negeri	9	11	11	11	12
Swasta	14	14	14	16	16

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, 2021

Secara kuantitas peningkatan SLB di Provinsi Lampung terus bertambah meskipun tidak terlalu signifikan, peningkatan tersebut dari jumlah 23 sekolah di tahun 2016 menjadi 28 sekolah di tahun 2020. Dengan jumlah sekolah sebanyak 11 SLB Negeri di tahun 2019 dapat menampung kapasitas siswa sebanyak 735 orang, sedangkan SLB swasta sejumlah 16 unit dapat menampung siswa sebanyak 1.012 orang. Adapun jumlah guru sampai dengan tahun 2019 mencapai 185 orang, jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan guru non PNS sebanyak 274 orang.

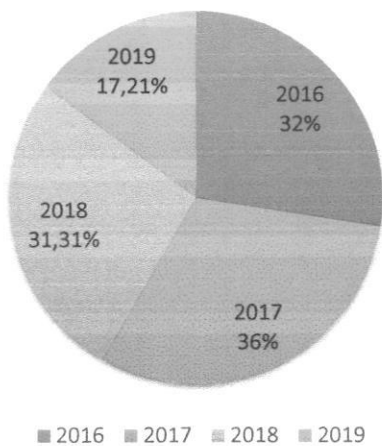
D. INFRASTRUKTUR BANGUNAN

Fasilitas sekolah menengah dengan kondisi bangunan baik meningkat dari tahun 2015 yaitu dari 6.119 sekolah (32%) menjadi 6.946 sekolah (36%) di tahun 2017. Meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu signifikan, namun telah menunjukkan adanya

dukungan program rehabilitasi maupun pembangunan terhadap infrastruktur sekolah menengah di Provinsi Lampung.

Grafik 2. 14 Sarana Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Lampung dalam Kondisi Bangunan Baik Tahun 2016-2019

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik 2016-2019



Sumber : Kemendikbud RI 2021, diolah

2.2.9 AKREDITASI SEKOLAH

A. SMA

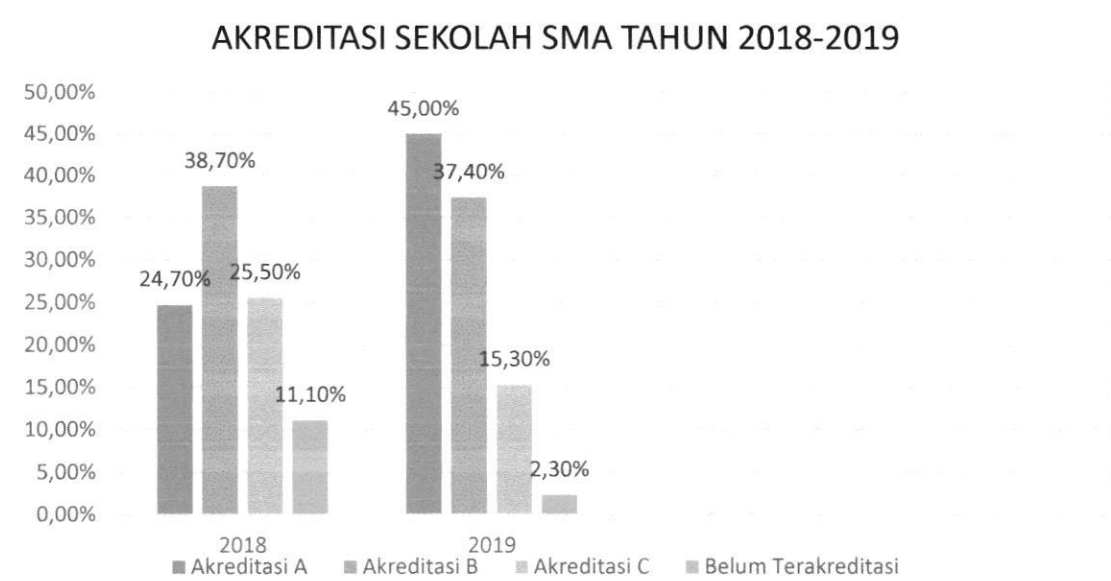
Peringkat akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi sekolah yang terakreditasi memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:

- Peringkat Akreditasi A (unggul) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 \leq NA \leq 100$).
- Peringkat Akreditasi B (baik) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 81 sampai dengan 90 ($81 \leq NA \leq 90$).
- Peringkat Akreditasi C (cukup) jika sekolah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 71 sampai dengan 80 ($71 \leq NA \leq 80$).

Sekolah Tidak Terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir :

- Nilai akhir 61 sampai dengan 70 ($61 \leq NA \leq 70$) dengan peringkat akreditasi D (kurang)
- Nilai akhir 0 sampai dengan 60 ($0 \leq NA \leq 60$) dengan peringkat akreditasi E (sangat kurang).

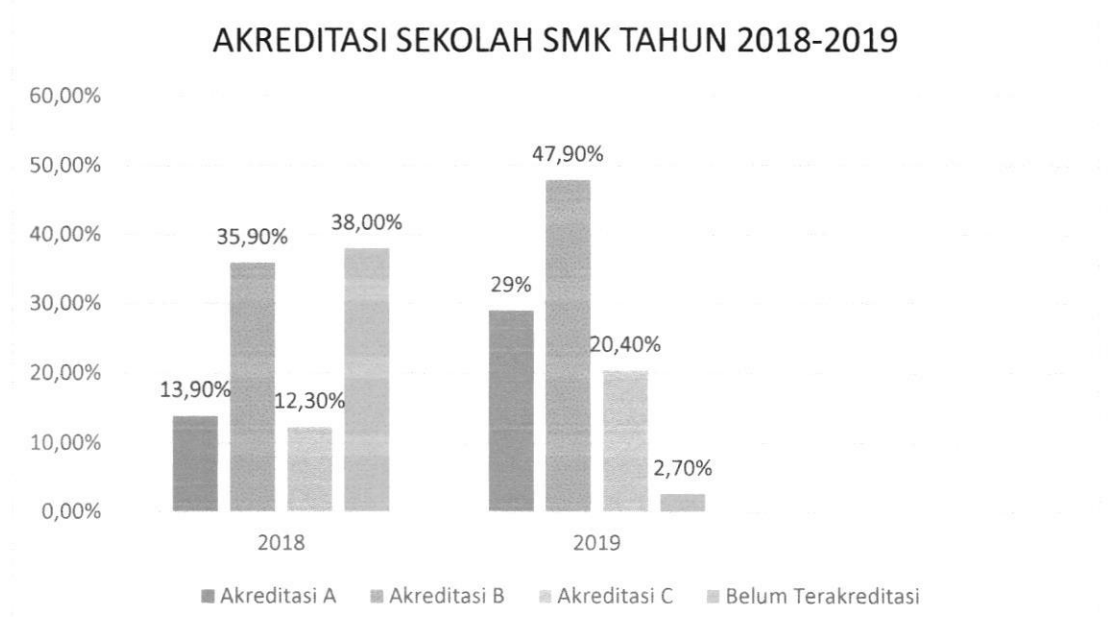
Grafik 2. 15 Akreditasi Sekolah SMA Provinsi Lampung Tahun 2018-2019



Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) 2020

Pada tahun 2019 jumlah sekolah (SMA) yang berakreditasi A meningkat cukup signifikan dari 24,70% menjadi 45%, hal ini menunjukkan dukungan pemerintah dalam capaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah diupayakan dengan baik, namun masih perlu mendapat perhatian dalam hal peningkatan mutu standar pendidik dan tenaga kependidikan serta mutu sarana dan prasarana di jenjang SMA.

Grafik 2. 16 Akreditasi Sekolah SMK Provinsi Lampung Tahun 2018-2019



Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) 2020

Akreditasi pada jenjang SMK secara signifikan menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dengan capaian sekolah yang terakreditasi A sebanyak 15,10% dan akreditasi B sebanyak 12%. Jenjang SMK yang diakreditasi terbanyak adalah di Kabupaten Lampung Timur 15 sekolah dan Kabupaten Lampung Tengah 11 sekolah.

BAB III

TINJAUAN REFERENSI

Semakin hari, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang. Perkembangan ini telah memberikan dampak yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, perkembangan teknologi-informasi yang diperkuat dengan kemudahan akses pada internet telah membuat dunia menjadi seolah tanpa batas. Bila sebelumnya ilmu pengetahuan dan teknologi didapat hanya dari sarana pendidikan, namun saat ini setiap orang dapat dengan mudah mengakses hal tersebut. Tidak ada lagi batas-batas ruang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga akhirnya berkembanglah berbagai konsep pendidikan yang didorong oleh perkembangan teknologi-informasi tersebut. Salah satu konsep tersebut adalah Konsep *Smart School* yang merupakan suatu konsep sekolah berbasis teknologi-informasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar.

Sebagai sebuah konsep baru dalam dunia pendidikan, Konsep *Smart School* diharapkan dapat menjadi jawaban atas upaya peningkatan kualitas pendidikan dimasa kini dan masa yang akan datang. Terlebih dunia saat ini mengalami era yang disebut oleh banyak pihak sebagai era disrupsi, yaitu terjadinya banyak perubahan yang sedemikian cepat dan mengubah banyak tatanan yang telah bertahan selama waktu yang lama. Munculnya berbagai perkembangan di bidang teknologi-informasi telah mengubah cara manusia dalam melakukan sesuatu. Hampir semua sendi kehidupan manusia terimbas oleh perkembangan teknologi-informasi, termasuk sektor pendidikan.

Saat ini, setiap orang dapat mengakses berbagai informasi melalui jaringan internet yang semakin mudah diakses. Dengan kemudahan tersebut, sejatinya lebih mudah bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat termasuk ilmu pengetahuan dan perkembangannya yang demikian pesat. Namun terkadang kemudahan akses terhadap dunia maya tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik. Sehingga tidak jarang, peluang bertambahnya ilmu pengetahuan tidak terjadi namun terkadang terjadi informasi yang bias bahkan mengarah kepada informasi yang menyesatkan (*hoax*). Fakta ini tentunya menjadikan disrupsi pada sektor pendidikan harus dapat dijadikan peluang sekaligus tantangan. Masih diperlukan upaya keras untuk menjadikan teknologi-informasi sebagai sarana melakukan percepatan peningkatan kualitas ilmu pengetahuan.

Sejak terjadinya Pandemi Covid-19 melanda kehidupan manusia secara global, Konsep *Smart School* menjadi semakin diperlukan. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat telah membuat interaksi fisik dan sosial antar-manusia menjadi semakin berkurang. Pada kondisi inilah, teknologi-informasi akan mendukung terwujudnya ekosistem pendidikan yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek penting dalam berjalannya proses belajar-mengajar di sekolah.

3.1 KONSEP SMART SCHOOL

Konsep *Smart School* merupakan ekosistem pendidikan sekolah yang menerapkan kegiatan pembelajaran berbasis teknologi, mulai dari proses belajar mengajar hingga manajemen dalam sekolah tersebut. *Smart School* adalah suatu konsep sekolah yang berbasis teknologi-informasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Penggunaan teknologi-informasi dalam pendidikan mencakup suatu sistem terintegrasi yang membantu komunitas pendidikan dalam menjalankan fungsi masing-masing dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik. Pada dasarnya penggunaan teknologi-informasi dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar dan meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan dan mengolah proses dan sumber teknologi yang memadai. Dengan kata lain, teknologi-informasi adalah sarana, bukan tujuan dari penerapan Konsep *Smart School*.

Tujuan utama dari Konsep *Smart School* adalah untuk menyediakan interaksi yang lebih tinggi diseluruh lingkungan sekolah. Pendidikan bukan hanya sekadar *transfer of knowledge* dari seorang guru kepada muridnya, akan tetapi juga diharapkan terjadi suatu proses interaksi seluruh unsur yang akan membuat pendidikan semakin kompleks dan kaya akan nilai-nilai. Interaksi yang semakin tinggi dari seluruh elemen pendidikan di sekolah baik itu guru, murid, sarana dan prasarana termasuk juga dengan lingkungan yang ada di luar sekolah akan lebih optimal ketika difasilitasi oleh teknologi-informasi yang memadai. Pada pelaksanaannya, Konsep *Smart School* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelibatan semua pihak yang ada di lingkungan sekolah, meningkatkan efektifitas dalam hal belajar-mengajar, meningkatkan level edukasi anak dengan sasaran digital dan meningkatkan kepuasan orang tua dengan sasaran digital yang dapat membantu komunikasi dan informasi terhadap perkembangan peserta didik dan sekolah.

Penggunaan teknologi dalam konsep sekolah pintar dapat terlihat dari beberapa hal. Dari sisi guru, pengelolaan administrasi lebih mudah dilakukan. Misalnya,

penulisan, penyusunan maupun perencanaan rencana pembelajaran dapat dibandingkan dengan rencana pembelajaran guru-guru lain yang tergabung dalam komunitas pendidikan. Memasukan nilai peserta didik juga bisa dilakukan secara *online* dan data tiap guru dapat disimpan di server sekolah dengan menggunakan jaringan internet. Teknologi-informasi berbasis internet juga dapat digunakan dalam membangun media komunikasi sekolah. Begitu juga dengan agenda online peserta didik yang dapat diakses melalui berbagai platform digital. Selain itu manfaat penggunaan teknologi-informasi juga lebih ramah lingkungan melalui penghematan penggunaan kertas, penyampaian informasi lebih cepat dan lebih mudah didapat, ketrampilan menggunakan teknologi terasah dan kinerja sekolah dan individu lebih baik.

Sebuah lembaga konsultan yang sangat terkenal yaitu Gallup Inc dari Washington DC Amerika Serikat mengeluarkan laporan hasil survei mengenai penggunaan teknologi-informasi pendidikan di sekolah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa setelah sekolah dan perguruan tinggi memperkenalkan teknologi-informasi, tingkat keterlibatan siswa dalam proses belajar meningkat sebesar 55%. Dalam laporan lainnya disebutkan bahwa 72% guru sekolah di Amerika Serikat percaya bahwa penggunaan teknologi-informasi akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada kemampuan belajar para siswa. Kedua laporan tersebut dilakukan jauh sebelumnya terjadinya Pandemi Covid-19. Dengan kata lain, sebelum terjadinya pandemi saja penggunaan teknologi-informasi dalam dunia pendidikan menjadi hal yang penting, terlebih di masa pandemi dimana interaksi fisik antar-manusia menjadi sangat terbatas. Maka tak heran, jika *Smart School* menjadi konsep yang perlu diterapkan sekolah masa kini dan masa depan.

David Perkins dalam bukunya *Smart Schools : From Training Memories to Educating Minds*, menjelaskan bahwa pendekatan pengajaran konvensional atau klasikal sering mengakibatkan pemahaman siswa yang terbatas tentang suatu mata pelajaran. Perkins memperkenalkan serangkaian metode yang mengesankan yang telah terbukti secara dramatis meningkatkan pemahaman siswa. Metode ini disebutnya sebagai Konsep *Smart School*. Konsep ini bersifat praktis dan mudah diterapkan di berbagai sekolah. Orang tua, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah, serta mereka yang peduli dengan kondisi pendidikan, akan menemukan bahwa Konsep *Smart School* sangat diperlukan karena menawarkan metode sistematis untuk membantu siswa berpikir dan belajar lebih efektif.

Lebih lanjut, menurut Perkins Konsep *Smart School* memiliki tiga karakter, yaitu:

- 1) *Informed* : pihak guru, murid hingga pihak administrasi sekolah mendapat informasi memadai dan memahami alur pikir, struktur serta tata hubungan kerja di sekolah secara baik.
- 2) *Energic* : tumbuhnya energi positif terhadap struktur, tata hubungan kerja sekolah, gaya sistem administrasi serta perlakuan guru dan murid.
- 3) *Thoughtful* : tumbuhnya nilai dan suasana yang penuh keramahan kepedulian dalam lingkungan sekolah. Selain sebagai lingkungan pendidikan yang menjadi tempat terjadinya *transfer of knowledge*, sekolah juga menjadi tempat yang penuh perhatian dimana seluruh pihak saling memahami kebutuhan satu sama lain dan bagaimana memperlakukan satu sama lain dengan baik.

Tidak hanya didukung karakter tersebut, sekolah yang menerapkan Konsep *Smart School* sudah ditopang oleh fasilitas perangkat keras digital, seperti proyektor, laptop, komputer dan tablet bahkan VR (*Virtual Reality*) dan juga fasilitas bangunan dan ruangan yang mendukung dan ditopang oleh jaringan internet yang memadai. Tak cukup itu saja, sekolah juga aktif menggunakan platform (sarana) digital dan aplikasi pendidikan seperti LMS (*Learning Management System*). Penggunaan platform digital tidak hanya mendukung proses belajar-mengajar, namun juga dapat menjadi sarana komunikasi antar guru, siswa, orang tua, termasuk lingkungan luar sekolah.

Dari berbagai literatur dan referensi yang ada, penerapan Konsep *Smart School* akan memiliki dampak yang signifikan terhadap sekolah, antara lain:

1. Mudah dan praktis

Siswa tidak perlu harus membeli produk seperti buku tulis atau pelajaran setiap semester. Karena yang dibutuhkan adalah perangkat laptop, jaringan internet serta *gadget* lain yang dapat digunakan untuk jangka waktu yang cukup lama. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah dapat lebih intensif karena berbasis teknologi-informasi dengan kemudahan pada akses internet. Karena itulah, penerapan Konsep *Smart School* membuat kegiatan belajar-mengajar di sekolah menjadi lebih mudah dan praktis.

2. Memperluas akses informasi

Teknologi-informasi yang terkoneksi ke jalur internet memberikan akses tanpa batas untuk mencari berbagai informasi. Guru dan murid dapat mengakses informasi di mana pun dan kapan pun mengenai pengetahuan yang berhubungan dengan mata pelajaran. Bahkan memberikan informasi pengetahuan lebih mendalam yang tidak dibahas di kurikulum resmi di

sekolah namun tetap berhubungan dengan substansi pelajaran. Sebagai contoh, dalam pelajaran tentang perkembangan teknologi komputer yang semakin berkembang, para siswa dapat senantiasa memperbaharui informasi dan pengetahuannya yang terkadang tidak terdapat pada *text-book* semata. Perkembangan *Artificial Intellegent*, *Big Data* dan lainnya dapat diakses melalui internet.

3. Pengalaman belajar interaktif

Manfaat dari Konsep *Smart School* lainnya adalah memberikan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan terlibat lebih dalam memahami pelajaran secara nyaman dan kedekatan dengan guru, seperti memberikan kuis atau *online test*. Dengan kondisi tersebut, suatu pelajaran yang disampaikan oleh guru dapat terus-menerus berkembang dengan diskusi dan pertukaran informasi yang didapat dari internet. Pada titik ini, peran guru sebagai pemicu dan pemacu berjalannya proses belajar-mengajar menjadi sangat penting.

4. Melibatkan orang tua murid

Di beberapa kalangan masyarakat terdapat pemahaman yang keliru tentang tanggung jawab pendidikan, yaitu orang tua merasa tanggung jawab dan proses pendidikan seluruhnya disebabkan kepada sekolah. Sehingga keterlibatan orang tua dalam mengawasi perkembangan pendidikan anaknya menjadi minim. Padahal sejatinya, pihak sekolah adalah harus diposisikan sebagai *partner* orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Pada penerapan *Smart School*, tidak hanya terjadi komunikasi antara guru dan siswa, keterlibatan orang tua untuk berkomunikasi dengan guru secara efisien dapat dilakukan melalui dukungan teknologi-informasi, salah satunya adalah aplikasi *classroom management*. Melalui aplikasi ini, orang tua dan guru dapat secara bersama-sama mengamati dan mengontrol perkembangan pendidikan setiap siswa. Sehingga dengan dukungan orang tua ini, siswa tidak hanya dapat belajar di sekolah, namun juga di rumahnya dengan pengawasan orang tua.

5. Ramah Lingkungan

Konsep *Smart School* dapat juga mendukung gerakan ramah lingkungan. Dengan penggunaan teknologi-informasi berbasis jaringan internet, penggunaan kertas dapat diminimalisir dan digantikan oleh *e-paper* ataupun file-file komputer yang dapat tersimpan dalam sistem dan diakses kapanpun oleh guru dan siswa melalui perangkat komputer ataupun *gadget*.

Sisi lain dari penerapan Konsep *Smart School* dapat dijelaskan dengan perspektif *Grant's Umbrella* atau Payung Grant. Perspektif ini menjelaskan bahwa pada Konsep *Smart School* dimana penggunaan software dan hardware komputer oleh pengguna pribadi akan membentuk kelompok individu yang melayani kepentingan masyarakat. Sekolah, sebagai salah satu institusi sosial, juga terpengaruh oleh perkembangan teknologi-informasi. Organisasi ini kemudian yang membentuk sistem informasi dan komunikasi di masyarakat. Perspektif ini merupakan sintesis dari Rogers (1986) yang mendefinisikan teknologi komunikasi sebagai struktur organisasi dan kumpulan nilai-nilai masyarakat berbasis perangkat keras di mana individu saling mengumpulkan, memproses dan menukar informasi.

3.2 PENERAPAN SMART SCHOOL DI INDONESIA

Pada situasi pandemi yang mengharuskan kegiatan belajar-mengajar dari rumah, peran teknologi-informasi berbasis digital semakin meningkat dan sangat dibutuhkan. Sekalipun sangat penting, namun keberadaan dan penggunaan teknologi-informasi digital tidak serta-merta dapat membuat meningkatnya kualitas pendidikan. Berhasil atau tidaknya implementasi penggunaan teknologi-informasi dalam proses belajar-mengajar juga berhubungan dengan perencanaan strategis, rasa memiliki, sumberdaya yang ada dan pengembangan profesionalitas. Sebagai contoh, program Konsep *Smart School* di Malaysia perlu waktu bertahun-tahun untuk diimplementasikan sehubungan dengan proses sosialisasi di kalangan birokrasi dan perencanaan strategis departemen yang bersangkutan. Tidak sedikit pihak yang menentang dan menganggap konsep ini akan menghilangkan esensi pendidikan, yaitu *transfer of knowledge and transfer of ethics* (Bajunid, 2008). Namun kondisi ini perlahan-lahan dapat diatasi melalui serangkaian perbaikan baik pada kurikulum maupun pada elemen lain seperti pemahaman dan keterampilan guru. Dengan perbaikan tersebut, satu persatu sekolah mulai menerapkan Konsep *Smart School* ini.

Meski belum merata, namun Konsep *Smart School* sudah diterapkan di beberapa sekolah yang ada di Indonesia. Beberapa contoh penerapan konsep *Smart School* di Indonesia antara lain :

1) *Smart School* Indonesia di Palembang – Sumatera Selatan

Smart School Indonesia di Palembang merupakan sekolah swasta yang menerapkan kurikulum berbasis *entrepreneur* untuk tingkat TK sampai SMA.

Sekolah dengan standar internasional ini dilengkapi fasilitas *techspace* untuk belajar *coding*, *robotic* hingga *e-Sport*. Di sekolah ini, siswa dilatih untuk menciptakan ide baru didukung skill serta karakter mereka untuk kedepannya. *Smart School* Indonesia bertujuan untuk menghasilkan alumni-alumni yang berdaya saing global dan yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia yang berkualitas dan yang memiliki karakter dan kemampuan *entrepreneurial* (kewirausahaan) dengan basis digital.

Sekolah ini memiliki misi antara lain :

- a. Menyediakan kurikulum sekolah yang membangun perilaku *entrepreneurial*
- b. Menyelenggarakan pembelajaran berbasis pengalaman belajar mandiri dan kolaboratif dengan didukung teknologi-informasi
- c. Menyediakan lingkungan belajar yang memfasilitasi siswa untuk bereksplorasi dan berkarya
- d. Mengembangkan sumber daya staf untuk menjadi pendamping siswa menemukan dan mengembangkan potensi diri

2) SMAN 15 Bandung – Jawa Barat

Penerapan Konsep *Smart School* di SMAN 15 Bandung dimulai dari sejak banyaknya bantuan komputer dari Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk keperluan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Kendati SMAN 15 Bandung memiliki fasilitas, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, namun manajemen sekolah memutuskan mulai menerapkan Konsep *Smart School*. Para siswa secara rutin melakukan kegiatan belajar-mengajar menggunakan komputer-komputer tersebut. Selain itu, digunakan juga fasilitas lain yang tersedia seperti proyektor dan didukung oleh *hotspot* yang ada di setiap kelas dan di beberapa titik sekolah. Para siswa juga dididik untuk menggunakan berbagai aplikasi dan platform digital baik online maupun offline untuk mendukung proses pembelajarannya.

3) SMK Negeri 1 Songgom, Kabupaten Brebes – Jawa Tengah

Salah satu platform layanan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang digunakan oleh SMK Negeri 1 Songgom sejak pertama kali kebijakan belajar dari rumah adalah *Microsoft 365*. SMK Negeri 1 Songgom tidak membuat platform *Learning Management System* (LMS) mandiri dan memanfaatkan platform yang sudah ada. Dengan satu platform, seluruh kebutuhan layanan pembelajaran era digital sudah

bisa terpenuhi. Sebagai contoh untuk melakukan tatap muka *virtual* dan pengelolaan kelas *virtual*, dari mulai interaksi *asynchronous*, pemberian tugas, pengumpulan tugas-tugas, penilaian serta pengumpulan portofolio pembelajaran, pihak sekolah bisa menggunakan *Microsoft Teams*.

Untuk keperluan evaluasi hasil belajar peserta didik, SMK Negeri 1 Songgom menggunakan *mobile exam pro* juga yang masih merupakan layanan *Microsoft Office 365*. Penggunaan *mobile exam pro*, tidak hanya untuk keperluan evaluasi hasil belajar, tetapi untuk presensi kehadiran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik melakukan presensi harian dengan melakukan swafoto menggunakan aplikasi *mobile exam pro*, dan datanya secara *realtime* akan direkam pada admin sekolah.

Orang tua/wali peserta didik dapat memantau perkembangan belajar putra/putrinya secara langsung melalui *smartphone* dengan login terlebih dahulu menggunakan akun siswa pada opsi orang tua. Hasil pantauan tersebut antara lain berupa kehadiran peserta didik dalam pembelajaran, rekapitulasi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah yang dilakukan oleh peserta didik dan hasil nilai mata pelajaran yang dihimpun oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Data yang disajikan dan terpantau oleh orang tua secara *realtime*, artinya setiap perubahan input data oleh admin sekolah mengenai perkembangan belajar peserta didik, akan terekam otomatis dan tersaji secara langsung.

Konsep *Smart School* yang diterapkan di SMK Negeri 1 Songgom perlahan-lahan telah membangun sebuah ekosistem pendidikan sekolah yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi-informasi berbasis digital dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran mengedepankan konsep *paperless* dan memanfaatkan teknologi-informasi. Hal ini merupakan tren pembelajaran yang diharapkan pihak sekolah pada era revolusi industri 4.0. SMK Negeri 1 Songgom menyadari bahwa tuntutan kedepan adalah *internet of things*, dengan mengurangi penggunaan kertas dalam aktivitas pengelolaan pembelajaran, maka pemanfaatan aplikasi *mobile exam pro* menjadi satu solusi untuk menjadikan SMK Negeri 1 Songgom sebagai sekolah cerdas atau *Smart School*.

Secara bertahap SMK Negeri 1 Songgom berusaha menransformasikan pembelajaran konvensional ke pembelajaran digital dengan memanfaatkan fitur-fitur *Microsoft 365*. Beberapa langkah yang telah dilaksanakan antara lain memindahkan kelas-kelas konvensional ke kelas-kelas virtual yang terintegrasi,

jadwal kegiatan belajar-mengajar konvensional dimigrasikan ke jadwal kegiatan belajar-mengajar daring. Intensitas pertemuan kelas virtual ditingkatkan tidak hanya saat jadwal rutin saja, tetapi kelas bisa dibuka kapan saja, sesuai kebutuhan peserta didik. Orang tua bisa ikut memantau perkembangan belajar peserta didik secara langsung dan *realtime* melalui *smartphone*. Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi saat pelaksanaan evaluasi dengan memanfaatkan *mobile exam pro*, serta pengelolaan pembelajaran yang berbasis digital dan meminimalkan penggunaan kertas (*paperless*) sehingga lebih ramah lingkungan.

4) SMPN 6 dan 12 Makassar – Sulawesi Selatan

Terdapat tiga indikator dalam pelaksanaan Program *Smart School* di Kota Makassar yaitu :

a. Modernisasi informasi

Pada aspek komunikasi antar guru, siswa dan orangtua siswa telah terbangun dan lebih mudah terlaksana dengan baik melalui pemanfaatan teknologi-informasi digital berbasis internet. Hal ini dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh elemen yang terlibat. Namun modernisasi lainnya berupa *student smart card* dan *smart classroom* belum terlaksana secara maksimal karena terkendala pada masalah finansial dimana pihak sekolah dituntut untuk mandiri dalam hal tersebut, sehingga masih kurangnya sosialisasi dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang seharusnya ada.

b. Tontonan yang mengandung informasi positif dalam lingkup area sekolah, dalam hal ini berupa *e-book* sudah berjalan dengan baik dan sangat mempermudah siswa dalam proses belajar mengajar. Namun platform *e-learning* lain belum terlaksana secara maksimal karena sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

c. Wadah kreatifitas siswa di bidang desain dan tulis menulis dalam suatu media, yaitu TV digital berbasis sekolah. Para siswa mampu mengembangkan potensinya di bidang tulis-menulis sehingga sangat bermanfaat bagi siswa.

Program *Smart School* SMPN 6 dan 12 Makassar ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi lingkungan eksternal sekolah. Namun di antara hal itu semua, faktor yang paling berpengaruh adalah

sumber daya finansial sekolah untuk menopang pelaksanaan *Smart School* ini. Dukungan anggaran yang berkesinambungan menjadi kata kunci yang sangat menentukan. Pihak sekolah sangat mengandalkan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan. Dukungan tersebut semakin penting dikarenakan pihak sekolah tidak diperkenankan untuk menarik pungutan lain dari pihak manapun.

BAB IV

KERANGKA PELAKSANAAN *SMART SCHOOL* DI PROVINSI LAMPUNG

Pembangunan sumber daya manusia yang handal merupakan salah satu fokus utama pemerintah, baik pusat dan daerah. Hal tersebut merupakan jalan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. Pembangunan sumber daya manusia sangat terkait dengan kualitas pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas adalah melalui integrasi dan kolaborasi seluruh komponen terkait pendidikan baik itu sarana dan prasarana maupun sumber daya pendidikan seperti guru, murid, kurikulum dan dukungan lingkungan sekitar.

Smart School merupakan suatu konsep pendidikan yang dirancang agar mampu mengintegrasikan berbagai unsur terkait seperti siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana serta lingkungan dalam suatu ekosistem pendidikan sekolah berbasis teknologi-informasi. Selain itu, Program *Smart School* merupakan salah satu Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang mendukung pencapaian Misi ke-3 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas”.

Pada dasarnya, penggunaan teknologi-informasi dalam bidang pendidikan adalah untuk membantu proses belajar-mengajar, meningkatkan kinerja dengan membuat, menggunakan, dan mengelola proses menggunakan teknologi yang memadai. Teknologi dalam pembelajaran adalah untuk memecahkan masalah belajar dan memfasilitasi pembelajaran. Penggunaan teknologi-informasi bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai sarana agar terwujud suatu ekosistem pendidikan yang terintegrasi. Karena fungsi dan perannya sebagai sarana penghubung ini, jenis teknologi-informasi yang digunakan harus dapat mampu mengintegrasikan berbagai unsur dalam proses belajar-mengajar. Tujuan akhirnya adalah agar potensi setiap peserta didik dapat dioptimalkan.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penerapan Konsep *Smart School* dirancang untuk mewujudkan suatu integrasi dan kolaborasi semua unsur di dalam sekolah untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, efisiensi dan kemampuan belajar peserta didik dengan menggunakan kearifan lokal. Selain itu, Konsep *Smart School* ini memungkinkan pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha maupun elemen masyarakat di luar entitas sekolah untuk memberikan

dukungan ekosistem pendidikan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

4.1 PILAR SMART SCHOOL

Smart School merupakan salah satu dari 33 Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Pada dokumen tersebut, secara tersirat *Smart School* memuat lima pilar yaitu :

1. *Smart Teacher* (Guru Cerdas)

Guru merupakan pilar yang sangat menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Seorang guru dituntut tidak hanya mampu melakukan proses *transfer of knowledge* saja, akan tetapi diharapkan mampu juga untuk menemukan dan memaksimalkan setiap potensi siswa-siswa yang dididiknya. Sebagai aktor utama dari sebuah proses belajar-mengajar, seorang guru akan menentukan apakah proses tersebut berjalan secara baik atau tidak. Para siswa umumnya akan sangat tergantung seperti apa bentuk dan pola pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Karena peran pentingnya tersebut, maka keberadaan guru cerdas (*Smart Teacher*) menjadi pilar penting dalam pelaksanaan *Smart School*. Salah satu upaya untuk membentuk guru cerdas adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan seperti pelatihan *Learning Management System* (LMS). Melalui LMS, seorang guru dilatih untuk dapat menciptakan proses belajar-mengajar yang kondusif dalam suasana yang lebih interaktif dibandingkan proses belajar-mengajar klasikal seperti yang umumnya dijumpai di berbagai tempat selama ini. Guru juga harus mampu mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan sehingga dapat menjadi magnet bagi siswa-siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat dilakukan bila seorang guru senantiasa melakukan pengembangan keilmuan dan praktik pengajaran.

Sasaran *Smart Teacher* adalah meningkatnya kompetensi tenaga pendidik dan konten materi pembelajaran serta evaluasi pembelajaran secara terpadu pada satuan pendidikan.

2. *Smart Student* (Siswa Cerdas)

Teroptimalkannya potensi siswa adalah tujuan dari diterapkannya Konsep *Smart School*. Sehingga siswa adalah pilar berikutnya dari pelaksanaan konsep ini. Namun untuk mewujudkan siswa cerdas (*Smart Student*) bukanlah proses yang sederhana dan instan. Diperlukan ekosistem pendidikan yang kondusif baik di dalam maupun di luar sekolah yang dapat membuat siswa merasa nyaman dan menikmati setiap tahap proses belajar yang dilakukannya. Melalui pelaksanaan *Smart School* ini, akan dilakukan proses belajar-mengajar yang memungkinkan siswa dibina dan diberi pengenalan dan latihan penyelesaian masalah (*problem solving*) menggunakan teknologi-informasi di dunia pendidikan. Dengan pembelajaran yang interaktif melalui penerapan *Learning Management System*, siswa tidak lagi diposisikan sebagai obyek pendidikan semata, akan tetapi dapat juga menjadi subyek yang melakukan pengajaran dalam bentuk yang berbeda. Sehingga dimungkinkan bagi siswa untuk melakukan belajar mandiri (*self learning*) melalui pembelajaran digital dan dilanjutkan dengan proses diskusi interaktif menggunakan teknologi-informasi.

Sasaran *Smart Student* adalah meningkatnya kompetensi siswa untuk berwirausaha dan *start-up business*. Salah satu langkahnya adalah dengan pelatihan kemampuan vokasi, pembuatan dan pendampingan *start-up business* sebagai wahana inkubasi bagi siswa.

3. *Smart Curriculum* (Kurikulum Cerdas)

Kurikulum merupakan komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum adalah suatu rencana yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar-mengajar (Sukmadinata, 2009). Jadi kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta metode yang digunakan, sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Sejalan dengan perkembangan zaman, kurikulum juga ikut berkembang untuk memenuhi tuntutan pendidikan. Perkembangan yang terjadi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan generasi bangsa yang memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan negara lain. Guru dan siswa yang bertemu dalam suatu proses belajar-mengajar memerlukan panduan berupa

seperangkat kurikulum pembelajaran. Sehingga pilar berikutnya dari Konsep *Smart School* ini adalah kurikulum cerdas (*Smart Curriculum*). Kurikulum cerdas adalah kurikulum yang disusun secara fleksibel berbasis layanan teknologi-informasi secara terpadu sehingga dapat mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Sasaran *Smart Curriculum* adalah meningkatnya layanan teknologi-informasi komunikasi pada satuan pendidikan. Langkah yang dilakukan adalah :

- a. Membuat *landing page* (halaman utama pada situs website) yang mengakomodir kepentingan stakeholder;
- b. Membangun pusat data konten pembelajaran dan evaluasi terpadu bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Lampung.

4. *Smart Facilities* (Sarana dan Prasarana Cerdas)

Keberadaan guru dan murid serta ditunjang oleh kurikulum yang memadai saja belum optimal dalam melaksanakan *Smart School* tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana cerdas (*Smart Facilities*) terutama pada pengembangan proses belajar-mengajar berbasis teknologi-informasi. Dengan dukungan sarana dan prasarana cerdas ini akan terwujud integrasi antar elemen pendidikan. *Smart Facilities* ini tidak hanya terkait dengan seperangkat perlengkapan digital semata, akan tetapi diperlukan juga platform pembelajaran berbasis digital. Saat ini sudah banyak dikembangkan berbagai platform pembelajaran digital baik oleh pemerintah seperti “Rumah Belajar” maupun oleh pihak swasta seperti *Microsoft Teams*, *Zoom Education* dan lain-lain. Sehingga diperlukan ketersediaan perlengkapan digital seperti komputer, laptop, koneksi internet, perlengkapan audio-visual dan ditopang oleh platform digital untuk memudahkan interaksi dan integrasi pihak-pihak terkait seperti guru dan murid.

Sasaran *Smart Facilities* adalah meningkatnya keterampilan hidup untuk siswa melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan sebagai fasilitas penunjang *start-up business*. Pemenuhan ini diutamakan melalui dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja, serta bantuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

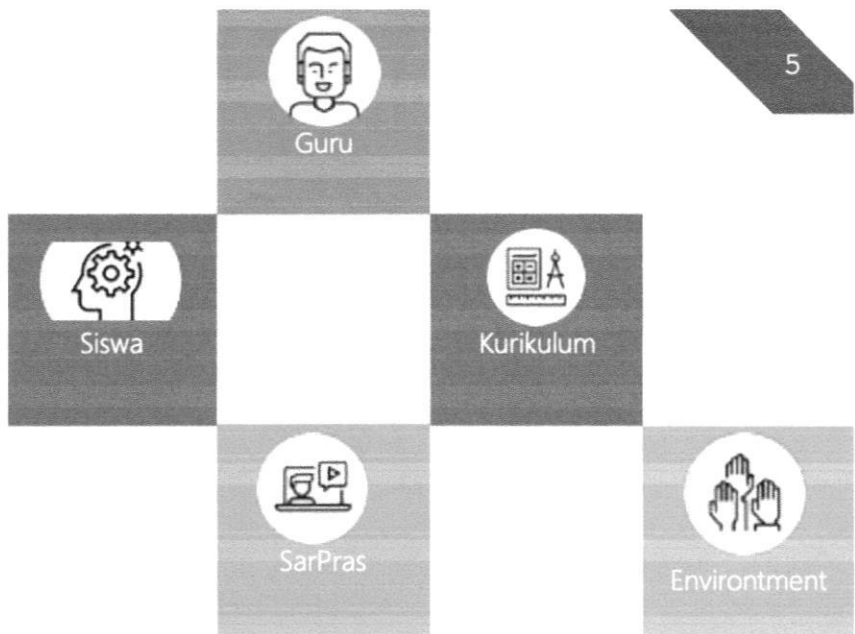
Dengan keterampilan hidup yang didapat dari pemenuhan sarana dan prasarana tersebut diharapkan mendorong siswa untuk menciptakan lapangan kerja.

5. *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)

Keberadaan sekolah juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Terlebih dengan adanya kebijakan zonasi dimana tujuannya adalah untuk mendekatkan sekolah dengan domisili siswanya, maka diperlukan juga dukungan lingkungan yang cerdas (*Smart Environment*) melalui pelibatan lingkungan sekitar sekolah, termasuk orang tua. Lingkungan sekitar sekolah juga bermakna dukungan program pemerintah sesuai tingkatannya seperti kelurahan dan kecamatan. Sebagai contoh anak yang tidak bersekolah akan mengikuti program sekolah paket B dan paket C. Kemudian bagi anak yang lulus dari paket B dan C akan melakukan pengabdian lingkungan sekitar agar nantinya dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat dengan membantu program pemerintah di lingkungannya sendiri seperti paket B dan C. Dengan demikian diharapkan keberadaan sekolah dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan angka partisipasi sekolah bagi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Smart Environment adalah terdatanya keterlibatan penduduk usia sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas. Melalui terdatanya keterlibatan ini, keberadaan sekolah memiliki manfaat terhadap kondisi pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya.

Gambar 4. 1 Lima Pilar *Smart School*



4.2 DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Sekalipun termasuk dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Lampung mutlak memerlukan keterlibatan lintas sektor di lingkungan pemerintahan, khususnya Pemerintah Provinsi Lampung. Namun sebagai *leading sector* dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Namun sebagai salah satu dari Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2019-2024, pelaksanaan *Smart School* harus melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan *stakeholder* lainnya. Sehingga kelembagaan pelaksanaan *Smart School* Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--|
| I. Penanggungjawab | : Gubernur Lampung |
| II. Ketua | : Wakil Gubernur Lampung |
| III. Wakil Ketua | : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Sekretaris | : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| V. Pokja Perencanaan | : a. Kepala Bappeda Provinsi Lampung |

- VI. Pokja Pelaksanaan

b. Kepala LPMP Provinsi Lampung

c. Dekan FKIP Universitas Lampung

d. Ketua PGRI Provinsi Lampung

a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- VII. Pokja Monitoring dan Evaluasi

a. Inspektur Provinsi Lampung

b. Kepala BPKP Provinsi Lampung

4.3 DUKUNGAN PENDANAAN

Sebagai salah satu dari 33 Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang mendukung pencapaian Misi ke-3 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Lampung perlu didukung oleh pendanaan baik bersumber APBD Provinsi Lampung, maupun bersumber anggaran lainnya. Pendanaan ini diperlukan agar pelaksanaan program ini dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga dapat mencapai tujuan akhirnya yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.

Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 telah memuat kerangka pendanaan untuk urusan pendidikan dimana pelaksanaan *Smart School* termasuk bagian di dalamnya. Kerangka pendanaan urusan pendidikan di Pemerintah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Kerangka Pendanaan Urusan Pendidikan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022-2024

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kerangka Pendanaan (Rp)		
			2022	2023	2024
1	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Satuan Pendidikan SMA berakreditasi minimal B	359.803.644.200	395.784.008.620	435.362.409.482
2	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Satuan Pendidikan SMA berakreditasi minimal B	96.668.000.000	106.334.800.000	116.968.280.000

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kerangka Pendanaan (Rp)		
			2022	2023	2024
3	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus	Persentase sekolah umum yang menerapkan program pendidikan inklusi	10.120.000.000	11.132.000.000	12.245.200.000
4	Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikasi	22.187.000.000	24.405.700.000	26.846.270.000
5	Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi	Persentase siswa berprestasi dan lembaga pendidikan yang dibina	14.300.000.000	15.730.000.000	17.303.000.000
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Persentase Sekolah yang meningkat sarana dan prasarananya	141.498.078.100	151.647.885.910	171.212.647.510
7	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah I	Persentase sekolah di wilayah I yang meningkat level akreditasinya	852.500.000	937.750.000	1.031.525.000
8	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah II	Persentase sekolah di wilayah II yang meningkat level akreditasinya	526.900.000	579.590.000	637.549.000
9	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah III	Persentase sekolah di wilayah III yang meningkat level akreditasinya	357.500.000	393.250.000	432.575.000
10	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah IV	Persentase sekolah di wilayah IV yang meningkat level akreditasinya	526.900.000	579.590.000	637.549.000
11	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah V	Persentase sekolah di wilayah V yang meningkat level akreditasinya	569.800.000	626.780.000	689.458.000
12	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VI	Persentase sekolah di wilayah VI yang meningkat level akreditasinya	629.200.000	692.120.000	761.332.000
13	Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VII	Persentase sekolah di wilayah VII yang meningkat level akreditasinya	407.000.000	447.700.000	492.470.000

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kerangka Pendanaan (Rp)		
			2022	2023	2024
14	Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	Persentase sekolah yang menerapkan Teknologi Informasi dalam proses belajar mengajar dan manajemen sekolah	4.400.000.000	4.840.000.000	5.324.000.000
15	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan	1.125.685.854.846	1.165.461.874.830	1.188.784.112.374
16	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Peningkatan Jumlah SMA, SMK, dan SLB yang Berakreditasi minimal B	611.417.235.850	617.729.014.866	645.981.949.322
17	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kegiatan Pengembangan Kurikulum Melalui Kegiatan Pemanfaatan Tik Di Sekolah Yang Dilaksanakan	660.000.000	357.000.000	364.140.000
18	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Seni dan Apresiasi Seni yang Mengikuti Kegiatan Pengembangan Kesenian Budaya	8.554.296.000	13.057.020.000	13.318.160.400

4.4 INDIKATOR PELAKSANAAN

Pelaksanaan *Smart School* ini dapat diwujudkan dalam bentuk *Smart Classroom* atau Kelas Cerdas. Secara fisik, *Smart Classroom* ini merupakan satu kelas khusus yang mampu mengintegrasikan guru dan murid melalui perangkat teknologi-informasi digital berbasis internet dengan dukungan kurikulum cerdas dan dapat dipantau perkembangannya oleh orang tua siswa. Untuk mendukung hal itu semua, diperlukan juga sebuah platfom pembelajaran yang dapat dijalankan baik secara daring dan luring.

Saat ini sudah banyak dikembangkan berbagai platform pembelajaran digital baik oleh pemerintah seperti “Rumah Belajar” maupun oleh pihak swasta seperti *Microsoft Teams*, *Zoom Education* dan lain-lain.

Gambar 4. 2 Ilustrasi Smart Classroom



Sumber : www.sipil.pnj.ac.id

Dengan adanya *Smart Classroom* ini, diperlukan ketersediaan sebuah ruang kelas yang nyaman dan didukung oleh perangkat teknologi-informasi seperti komputer, laptop, *smart television*, jaringan internet yang stabil dan platform pembelajaran digital. Sehingga, indikator dilaksanakannya Konsep *Smart School* di suatu sekolah adalah adanya *Smart Classroom* ini.

Tabel 4. 2 Indikator Pelaksanaan *Smart School* Provinsi di Lampung

No	Indikator	Target	Tahun			Ket
			2022	2023	2024	
1	Penyusunan Kerangka Kerja	Tersusunnya 15 kerangka kerja pelaksanaan <i>Smart School</i>	15	-	-	
2	Pilot Project <i>Smart School</i>	Terwujudnya Smart Classroom di 4 lokus Pilot Project <i>Smart School</i>	4	-	-	
3	Pelaksanaan <i>Smart School</i> Provinsi Lampung	Terwujudnya <i>Smart School</i> di 15 Kab/Kota se-Provinsi Lampung	-	7	8	

Tabel 4. 3 Program Dan Rencana Aksi *Smart School* Lampung Berjaya Tahun 2022-2024

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERUMUSAN FOKUS	PERUMUSAN RENCANA AKSI	RINCIAN SATUAN OUTPUT	OUTPUT
1.	Program <i>Smart School</i> Lampung Berjaya	1. SMART TEACHER	1 Standarisasi Media Pembelajaran	Pelatihan & Workshop Pembuatan Konten 1 Pembelajaran Terpadu (MGMP) --> Literasi Digital Daerah	* 18 MAPEL * 1 MAPEL memiliki 30 KD * 1 KD dikerjakan oleh 4 Guru 18 Mapel x 30 KD = 540 * Konten	Indikator Sasaran : Konten Digital Terpadu 540 untuk Jenjang SMA
				Pelatihan Pembuatan Konten Evaluasi Terpadu Terpadu (MGMP) --> Literasi Digital Daerah	* 18 MAPEL * 1 MAPEL memiliki 30 KD * 1 KD dikerjakan oleh 4 Guru 18 Mapel x 30 KD = 540 * Konten	Indikator Sasaran : Konten Evaluasi Terpadu 540 untuk Jenjang SMA
			2 Enterpreneur Skill Siswa	1 Pelatihan & Hardskil Guru PKWU dengan pelaku usaha ekonomi kreatif	* 4 Bidang Keahlian (BK) * 1 BK memfokuskan 4 Ketrampilan * 1 Kab/kota dipilih 5 Sekolah 5 Skl x 4org x 15Kab/Kot = * 300 Org	Indikator Sasaran : Pengajar terlatih 300 untuk Jenjang SMA
			3 Diseminasi	1 Pengimbasan kepada seluruh guru pada satuan Pendidikan	* 1 Sekolah 10 org * 1 Kab/Kota memfokuskan 10 Sekolah 10 Skl x 10org x 15Kab/Kot = * 1500 Org	Indikator Sasaran : Pengajar terlatih 1500 untuk guru Jenjang SMA
			4 Sister School	1 Studi Pembelajaran dan Sekolah Pendamping (Sister School)	* 15 sekolah * 1 sekolah menentukan sister school/univ 15 skl x 4 guru x 15 kab/ko = * 900 guru	Indikator Sasaran : Guru mengikuti studi pembelajaran 900 orang Terjalin kemitraan sekolah dengan sekolah/univ

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERUMUSAN FOKUS	PERUMUSAN RENCANA AKSI	RINCIAN SATUAN OUTPUT	OUTPUT
		2. SMART STUDENT	1 Entrepreneur Skill Siswa	1 Pelatihan/Sertifikasi bagi Siswa	* 1 Sekolah 10 org * 1 Kab/Kota memfokuskan 5 sekolah * 5 Skl x 10org x 15Kab/Kot = 750 Org	Indikator Sasaran : Siswa terlatih 750 untuk siswa Jenjang SMA
				2 Pembuatan dan pendampingan Start-up Business sebagai wahana inkubasi bisnis untuk siswa	* 1 Sekolah 1 wahana * 1 Kab/Kota memfokuskan 5 Sekolah * 5 Skl x 15Kab/Kot = 75 Wahana	Indikator Sasaran : Wahana terbentuk 75 untuk Sekolah Jenjang SMA
			2 Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) Siswa	1 Pembinaan Siswa Berprestasi	* 1 Sekolah 10 org * 1 Kab/Kota memfokuskan 2 Sekolah * 2 Skl x 10org x 15Kab/Kot = 300 Org	Indikator Sasaran : Siswa terlatih 300 untuk siswa Jenjang SMA
		3. SMART CURICULLUM	1 Membangun Web Terpadu sebagai pusat Aplikasi Smart School dengan Dinas KOMINFO & Team Teknis	1 Pembuatan Landing Page (terintegrasi dengan aplikasi Pusat)	* 1 Paket	Indikator Sasaran :
				2 Pembangunan Aplikasi Tata Kelola Satuan Pendidikan	* 15 Sekolah Percontohan	Tersedianyan Web Terpadu Smart School
				3 Publikasi Bank Data Pendidikan 4 Pembuatan E-commerce (Start-up Business Sekolah) 5 Pusat Literasi Digital Daerah & Mulok	* 1 Paket * 1 Paket * 1 Paket	
			2 Pembuatan Kurikulum Smart School Lampung Berjaya	1 Pendampingan & Penguatan Kelembagaan dengan OPD terkait (Disnaker, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Pariwisata Ekraf & PMD)	* Pembuatan MoU dengan OPD terkait	Indikator Sasaran : Tersedianya SK Gubernur tentang Kurikulum Double Track

No.	PROGRAM	KEGIATAN	PERUMUSAN FOKUS	PERUMUSAN RENCANA AKSI	RINCIAN SATUAN OUTPUT	OUTPUT
			(Double Track)	2 Pengembangan Layanan TIK Terpadu & pembelajaran project work,	* Pembuatan MoU dengan Sekolah	
				3 Sosialisasi & Pengimbasan pada satuan Pendidikan	* Pembuatan MoU dengan Sekolah	
		4. SMART FACILITIES	1 Sarana IT Penjunjang Pembelajaran	1 Penyediaan Smart Classroom (Workspace for Education)	* Papan Tulis Interaktif	Indikator Sasaran : Tersedianya Papan Tulis Interaktif 75 set
			2 Perangkat Pendukung kerja untuk wirausaha	1 Sarana Prasarana difokuskan untuk fasilitas penunjang Start-up Bussiness	* 1 Kab/Kota memfokuskan 5 Sekolah * 5 Skl x 15Kab/Kot = 75 Paket	Indikator Sasaran : Tersedianya fasilitas penunjang ketrampilan 75 set
				2 Pembentukan UMKM sekolah (koperasi Sekolah)	* 1 Kab/Kota memfokuskan 5 Sekolah * 5 Skl x 15Kab/Kot = 75 Koperasi	Indikator Sasaran : Tersedianya Koperasi Sekolah 75 set
			5. SMART ENVIRONMENT	1 Gerakan ReUse - ReCycle - ReDuce di sekolah	* 1 Kab/Kota memfokuskan 5 Sekolah	Indikator Sasaran :
				2 Gerakan Energy Terbarukan di sekolah	* 5 Skl x 15Kab/Kot = 75 Koperasi	Tesedianya Sekolah go grean sebanyak 75
				2 Environment Eksternal (SSR --- >School Social Responsibility)	* 1 Kab/Kota memfokuskan 5 Sekolah * 5 org x 5 Skl x 15Kab/Kot = 375 org	Indikator Sasaran : Terpenuhiya lulusan Paket C sebanyak 375 org
				3 Ekspose & Promotion Kegiatan	* Event Provinsi 1 kali * Event Kab/Kota 15 kali * Event Sekolah 2 kali	Indikator Sasaran : 18 kali Event

Gambar 4. 3 Bagan Proses Pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Lampung



Pada bagan di atas, pelaksanaan *Smart School* dimulai dari tahap pemetaan potensi lokus sekolah yang akan dijadikan sebagai pilot project pelaksanaan *Smart School* sampai kepada proses monitoring dan evaluasinya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Agar pelaksanaan *Smart School* berjalan sesuai dengan tujuannya, mutlak diperlukan proses pengendalian dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Pengendalian adalah suatu proses pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan definisi tersebut, maka perlu disusun pola pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif dengan menilai capaian target-target yang sudah disusun. Sehingga diperlukan juga pembentukan suatu tim koordinasi yang melibatkan pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan proses pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Smart School*.

Beberapa indikator dan target keberhasilan pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Lampung antara lain :

- 1) Terwujudnya Smart Classroom di 4 lokus Pilot Project *Smart School* di Provinsi Lampung
- 2) Terwujudnya *Smart School* di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung

5.1 MONITORING

Tujuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Smart School* adalah :

- 1) Mendapatkan informasi-informasi mengenai perkembangan pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Lampung
- 2) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Lampung

5.2 EVALUASI

Evaluasi merupakan proses yang tidak terpisahkan dari suatu siklus manajemen, yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan diakhiri dengan proses evaluasi. Tujuan dari evaluasi antara lain :

- 1) Melakukan evaluasi terhadap indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Lampung.

- 2) Merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Lampung.

BAB VI

PENUTUP

Dalam sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia, pendidikan menjadi faktor kunci keberhasilan suatu bangsa untuk semakin maju dan sejahtera. Melalui pendidikan, terbentuklah sumber daya manusia berkualitas yang selanjutnya menjadi pendorong bagi kemajuan dan pertumbuhan di berbagai sektor kehidupan. Bangsa Jepang dan Korea Selatan menjadi contoh bagaimana pendidikan menjadi prioritas pemerintah pasca Perang Dunia ke-2. Setelah itu mereka bangkit dan secara perlahan dapat menjadi bangsa maju. Berkaca pada hal tersebut, maka pendidikan harus menjadi program prioritas bagi pemerintah, tidak terkecuali Pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan mengakibatkan pesatnya perubahan yang terjadi di seluruh dimensi kehidupan, maka perlahan-lahan konsep pendidikan juga mengalami banyak perubahan. Terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi-informasi yang pada akhirnya memaksa diadopsinya suatu bentuk pendidikan yang lebih efisien, lebih luas daya jangkauannya dan dapat menghubungkan berbagai elemen pendidikan tanpa ada lagi batasan ruang. Lahirlah Konsep *Smart School* yang mampu mengintegrasikan berbagai unsur pendidikan seperti siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana serta lingkungan dalam suatu ekosistem pendidikan sekolah berbasis teknologi-informasi. Sudah banyak contoh keberhasilan pelaksanaan *Smart School*, baik di dalam maupun di luar negeri.

Disusunnya dokumen Masterplan Pendidikan *Smart School* Provinsi Lampung ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan *Smart School* di Provinsi Lampung. Dengan dilaksanakannya *Smart School* di Provinsi Lampung diharapkan dapat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI